



SENSUS EKONOMI 2016
ANALISIS HASIL *LISTING*

POTENSI EKONOMI KOTA SEMARANG



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL *LISTING*

POTENSI EKONOMI KOTA SEMARANG



Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil *Listing* Potensi Ekonomi Kota Semarang

No. Publikasi : 33740.1731
Katalog BPS : 9102059.3374
Ukuran Buku : 17,6 x 25cm
Jumlah Halaman : viii + 100 halaman

Naskah :
Sie Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Sie Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Dicetak oleh :
CV Citra Yunda

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah

Erisman

Penanggung Jawab

Sarwono

Penulis

Lilis Anisah

Pengolah Data

Lilis Anisah

Desain dan Tata Letak Layout

Rizka Ita Yuanita adopsi dari Publikasi BPS RI

Kontributor Data

Sekretariat SE2016 Kota Semarang

<https://semarangkota.bps.go.id>

Kata Pengantar

Kegiatan analisis hasil pencacahan lengkap Sensus Ekonomi 2016-Listing (SE2016-L) merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Kegiatan analisis hasil pencacahan lengkap SE2016-L dimaksudkan untuk menyampaikan fakta terkait dengan kondisi ekonomi Kota Semarang yang diulas lebih dalam. Melalui kegiatan ini diharapkan gambaran kondisi perekonomian di Kota Semarang dapat disampaikan kepada publik dalam bentuk Publikasi Potensi Ekonomi Kota Semarang 2016.

Publikasi Potensi Ekonomi Kota Semarang 2016 ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi kewilayahan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh konsumen data, baik dunia usaha, peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

Semarang, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Semarang



Erisman, M.Si.



Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1	1
Potensi Ekonomi Kota Semarang	3
• Potensi Sumber Daya yang Melimpah	3
• Kondisi Perekonomian Kota Semarang	15
Bab 2	29
A. Karakter Topografi	31
B. Kawasan Rawan Bencana	32
C. Kondisi Keamanan dan Kesejahteraan Rakyat	33
Bab 3	47
Pengembangan Potensi Ekonomi Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan	49
A. Optimalisasi Sektor Potensial	49
B. Penentuan Sektor Unggulan	53
Bab 4	57
Sektor Unggulan Kota Semarang : Jasa Kategori H, I, K, M, N, Q, R, S dan U	59
Bab 5	67
Sektor Potensi : Kategori C, F, G, J, L dan P	69
Bab 6	73
Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

Daftar Pustaka	77
Catatan Teknis	83
Lampiran	93

<https://semarangkota.bps.go.id>

bab

1



POTENSI EKONOMI
KOTA SEMARANG

Potensi Ekonomi Kota Semarang

A. Potensi Sumber Daya yang Melimpah

Pembangunan suatu daerah perlu memperhatikan potensi ekonomi daerah tersebut. Suparmoko (2002, h. 99) menyatakan potensi ekonomi daerah sebagai “Kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan”. Kota Semarang memiliki potensi ekonomi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Potensi Geografis

Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat sebagai berikut:

1. Koridor utara sebagai pintu masuk dari utara, timur dan barat melalui jalur laut.
2. Koridor selatan menghubungkan kota-kota dinamis yaitu Yogyakarta dan Surakarta yang dikenal sebagai koridor Merapi-Merbabu.
3. Koridor timur menghubungkan kota Surabaya dan sekitarnya.
4. Koridor barat menghubungkan kota Jakarta dan sekitarnya.

Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia. Kondisi tersebut memungkinkan Kota Semarang menjadi kota dagang, industri dan kota transit yang cukup menjanjikan.

Dengan luas wilayah 373,70 km² Kota Semarang terbagi menjadi tiga wilayah pembantu walikota, 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, dua kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Mijen (62,15 km²) dan kecamatan Gunungpati (53,99 km²). Kedua kecamatan tersebut terletak dibagian selatan yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar wilayahnya terdapat areal persawahan dan perkebunan. Dua kecamatan dengan wilayah luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km².

Berdasarkan pembagiannya, Kota Semarang terdiri dari 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Selain itu, Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Jogjakarta dan Solo. Dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang sebagai kota industri, perdagangan dan jasa dimana perkembangan aktivitas industri, perdagangan dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung dan mendorong aktivitas perkotaan di Kota Semarang, diwujudkan kawasan PETAWANGI (Peterongan-Tawang-Siliwangi). Kawasan PETAWANGI merupakan kawasan strategis yang disediakan dengan tujuan pembukaan potensi investasi perdagangan, jasa, dan industri khususnya pada koridor Jalan Siliwangi – Kawasan Pusat Kota – Jalan Kaligawe dan Jalan Majapahit.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Distribusinya di Kota Semarang Tahun 2016

Kode (1)	Kecamatan (2)	Luas (Km ²) (3)	Distribusi Luas (%) (4)
010	Mijen	57,55	15,40
020	Gunungpati	54,11	14,48
030	Banyumanik	25,69	6,87
040	Gajahmungkur	9,07	2,43
050	Semarang Selatan	5,928	1,59
060	Candisari	6,54	1,75
070	Tembalang	44,2	11,83
080	Pedurungan	20,72	5,54
090	Genuk	27,39	7,33
100	Gayamsari	6,177	1,65
110	Semarang Timur	7,7	2,06
120	Semarang Utara	10,97	2,94
130	Semarang Tengah	6,14	1,64
140	Semarang Barat	21,74	5,82
150	Tugu	31,78	8,50
160	Ngaliyan	37,99	10,17
	Kota Semarang	373,7	100,00

Sumber : BPS, diolah

2. Potensi Kawasan Strategis

Berdasarkan karakteristik wilayah Kota Semarang, terdapat potensi kawasan strategis di Kota Semarang sebagai berikut :

2.a. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan cepat berkembang di Kota Semarang adalah kawasan pusat kota yang terletak pada Koridor Peterongan – Tawang – Siliwangi (PETAWANGI). Trend perubahan intensitas kegiatan perdagangan di kawasan PETAWANGI untuk 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus terjadi.

Berdasarkan dokumen RTRW 2011-2031, arahan kebijakan untuk kawasan cepat berkembang dikembangkan untuk :

- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala besar harus memberikan ruang bagi kegiatan sektor informal untuk melakukan kegiatannya.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus mempertimbangkan rasio kecukupan ruang parkir dan ruang terbuka hijau dalam rangka menciptakan kawasan PETAWANGI yang nyaman.
- Pengaturan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang spesifik per koridor jalan untuk menciptakan spesifikasi perkembangan kawasan.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus menghindari perkampungan atau kawasan yang memiliki nilai historis bagi Kota Semarang.

2.b. Potensi Kawasan Perbatasan

Perkembangan kawasan perkotaan antara Wilayah Kota Semarang mempengaruhi Daerah Kabupaten disekitarnya, khususnya di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan tersebut merupakan potensi yang memerlukan kerjasama dengan Kabupaten tetangga. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, terdapat empat kawasan yang berpotensi dalam hal pengembangan industri, perdagangan, jasa, transportasi dan penyediaan akomodasi yang memerlukan kerja sama dengan wilayah tetangga sebagai berikut:

Tabel 2. Potensi Kawasan Perbatasan

No	Potensi	Wilayah Perbatasan
(1)	(2)	(3)
1	Pengembangan Industri	Kawasan Genuk - Sayung
	Transportasi	
	Penyediaan Perumahan dan Fasilitas Pendukungnya	
2	Pengembangan Industri	Kawasan Pedurungan - Mranggen
	Transportasi	
	Penyediaan Perumahan dan Fasilitas Pendukungnya	

(Lanjutan) Tabel 2. Potensi Kawasan Perbatasan

No	Potensi	Wilayah Perbatasan
(1)	(2)	(3)
1	Pengembangan Industri	Kawasan Mangkang - Kaliwungu
	Transportasi	
	Penyediaan Perumahan dan Fasilitas Pendukungnya	
2	Pengembangan Industri	Kawasan Banyumanik - Ungaran
	Transportasi	
	Penyediaan Perumahan dan Fasilitas Pendukungnya	

Sumber : RPJMD Kota Semarang 2016-2021

3. Potensi Pariwisata serta Pendukungnya

Kota Semarang memiliki Kawasan Cagar Budaya Kota Lama. Kawasan bersejarah Kota Lama merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Selain Kawasan Cagar Budaya Kota Lama, Kota Semarang memiliki berbagai obyek wisata yang tercatat aktif memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Kota Semarang.

Tabel 3. Destinasi Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016

KATEGORI	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT
A. WISATA ALAM	1 GOA KREO	Desa Talun Kacang Kandri
	2 HUTAN WISATA TINJOMOYO	Desa Tinjomoyo Sukorejo Gunungpati
	3 PANTAI MARINA	Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari
	4 MANGROVE EDUCATION CENTER	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang
	5 DESA WISATA KANDRI	Desa Talun Kacang Kandri Gunungpati
	6 DESA WISATA WONOLOPO	Desa Wonolopo Mijen
	7 DESA WISATA NONGKOSAWIT	Desa Nongkosawit Gunungpati
	8 DESA WISATA JAMALSARI	Desa Jamalsari Kel. Kedungpane
	9 DESA WISATA JATIREJO	Desa Jatirejo Gunungpati Semarang

(Lanjutan) Tabel 3. Destinasi Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016

KATEGORI	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT
(Lanjutan) A. WISATA ALAM	10 KEBUN AGRO BISNIS	Desa Cepoko Gunungpati
	11 RIVER TUBING NGITIR KALIJOGO KANDRI	Desa Kandri Gunungpati
B. WISATA BUDAYA	12 TAMAN BUDAYA RADEN SALEH	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang
	13 GEREJA BLENDUK/ KAWASAN KOTA LAMA	Jl. Letjen Suprpto No. 32 Semarang
	14 GEDUNG LAWANG SEWU	Jl. Pemuda Kompleks Tugu Muda
	15 MASJID AGUNG JAWA TENGAH	Jalan Gajah
	16 KLENTENG SAM POO KONG GEDUNG BATU	Jl. Simongan No.129 Semarang
	17 MUSEUM JAMU NYONYA MENEER	Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang
	18 VIHARA MAHAVIRA	Kompleks Marina Semarang
	19 PURI AGUNG GIRINATHA	Jl. Sumbing Semarang
	20 MUSEUM MANDALA BHAKTI	Jl. Tugu Muda No.1 Semarang
	21 MUSEUM MURI DAN JAMU JAGO	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 4 Semarang
	22 PAGODA AVALOKITESVARA	Jl. Perintis Kemerdekaan
	23 MAKAM KI AGENG PANDANARAN	Jl. Mugas Dalam 2 No.4 Mugasari
	24 MUSEUM PERADABAN ISLAM	Desa Tinjomoyo Sukorejo Gunungpati
	25 WIDYA MITRA PUSAT KE-BUDAYAAN BELANDA	Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari
	26 SEMARANG ART GALERY	Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang
	27 MASJID LAYUR KAMPUNG MELAYU	Desa Talun Kacang Kandri Gunungpati
	28 PETILASAN WASIS JOYO KUSUMO	Desa Wonolopo Mijen

(Lanjutan) Tabel 3. Destinasi Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016

KATEGORI	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT
(Lanjutan) B. WISATA BUDAYA	29 MAKAN KYAI SAFI'I WONOSARI	Desa Nongkosawit Gunungpati
	30 MAKAM RAJA PRAGOLAPATI GUNUNGPATI	Desa Jamalsari Kel. Kedungpane
	31 MAKAM PANGERAN HARTO GUMILAR NONGKO	Desa Jatirejo Gunungpati Semarang
	32 KAWASAN PECIANAN TAY KAK SI	Desa Cepoko Gunungpati
	33 MAKAM SYECH JUMAIDIL QUBRO	Desa Kandri Gunungpati
	34 MUSEUM RONGGOWARSITO	Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang
	35 GEDUNG SOBOKARTI	Jl. Letjen Suprpto No. 32 Semarang
C. WISATA BUATAN	36 TUGU MUDA	Kompleks Tugu Muda Semarang
	37 TAMAN MARGASATWA SEMARANG	Jl. Raya Mangkang Semarang
	38 KAMPOENG WISATA TAMAN LELE	Jl. Raya Tugu KM. 10 Semarang
	39 KAWASAN SIMPANG LIMA	Kompleks Simpang Lima
	40 WATER BLASTER	Jl. Bukit Candi Golf No.7 Semarang
	41 TAMAN REKREASI MARINA	Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari
	42 BANDENG PRESTO	Jl. Pandanaran Semarang
	43 LOENPIA EXPRESS	Jl. Gajahmada Semarang
	44 WINGKO BABAT	Jl. Teuku Umar
	45 MALL PARAGON	Jl. Pemuda No. 118 Semarang
	46 MALL CIPUTRA	Jl. Simpang Lima No.1 Semarang
	47 DP MALL	Jl. Pemuda No.150
	48 JAVA MALL	Jl. MT. Haryono No. 992-994 Semarang
	49 KAMPOENG BATIK	Jl. Batik Bubakan Semarang
	50 PURI BATIK	Jl. Dr. Sutomo No.11 Semarang
51 KAMPOENG SEMARANG	Jl. Kaligawe KM.1 No.98 Semarang	
53 CLUB MERBY	Jl. MT. Haryono No.653 Semarang	

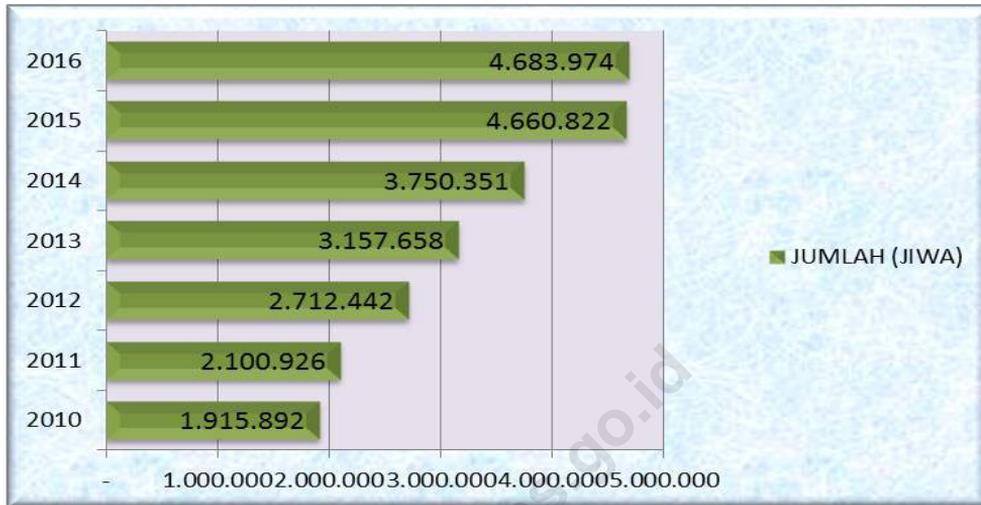
(Lanjutan) Tabel 3. Destinasi Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016

KATEGORI	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT
(Lanjutan) C. WISATA BUATAN	54 PUSAT OLEH OLEH PANDANARAN	Jl. Pandanaran Semarang
	55 WARUNG SEMAWIS PECINAN	Gang Waru Pecinan Kranggan Semarang
	56 KAMPUNG LAUT	Jl. Komplek PRPP Maerokoco Semarang
	57 WONDERIA	Jl. Sriwijaya No.29 Semarang
	58 GARDU PANDANG	Taman Tabanas Gombel
	59 WISATA MICE (EVENT-EVENT DI KOTA SEMARANG)	<i>Semarang Night Carnival, Semarang Great Sale, Symphoni Kota Lama, Dugderan Semarang, Festival Perahu Warak, Mahakarya Legenda Goa Kreo</i>
	60 PUJASERA SIMPANG LIMA	Kawasan Simpang Lima Semarang
	61 PUJASERA TAMAN MENTERI SUPENO	Jl. Menteri Supeno Semarang
	62 GALERI BUNGA POJOK TAMAN KB	Jl. Menteri Supeno
	63 JUNGLE TOON	Perumahan Graha Wahid Manyaran

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Selain jumlah obyek wisata, banyaknya kunjungan wisnus, wisman, jumlah hotel, restoran dan rumah makan merupakan beberapa indikator pendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Semarang.

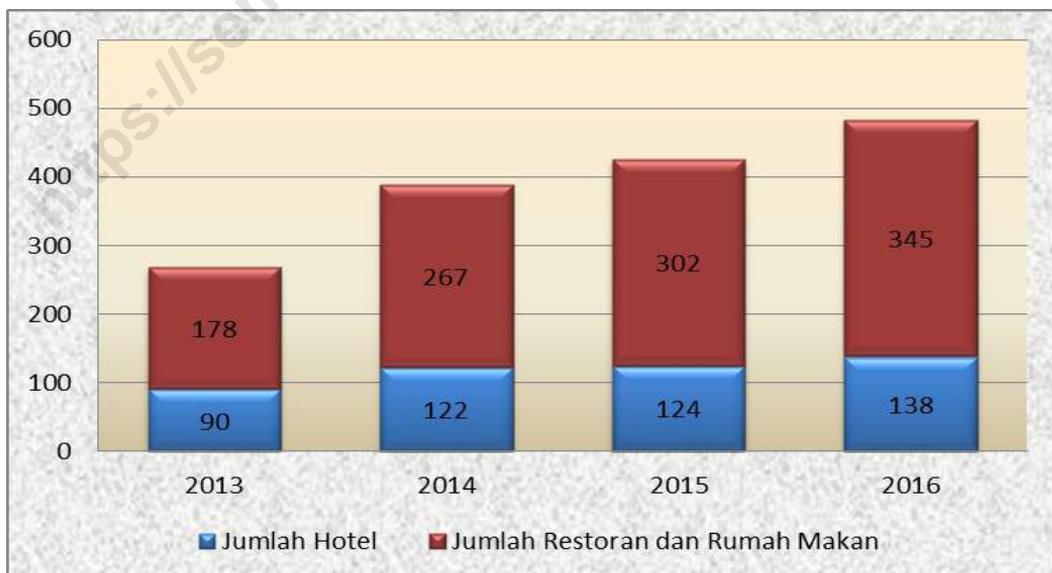
Gambar 1. Banyaknya Kunjungan Wisnus dan Wisman ke Kota Semarang



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Keseluruhan indikator tersebut menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun, memberi arti potensi pariwisata kota Semarang cukup menjanjikan untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi.

Gambar 2. Banyaknya Hotel, Rumah Makan dan Restoran di Kota Semarang

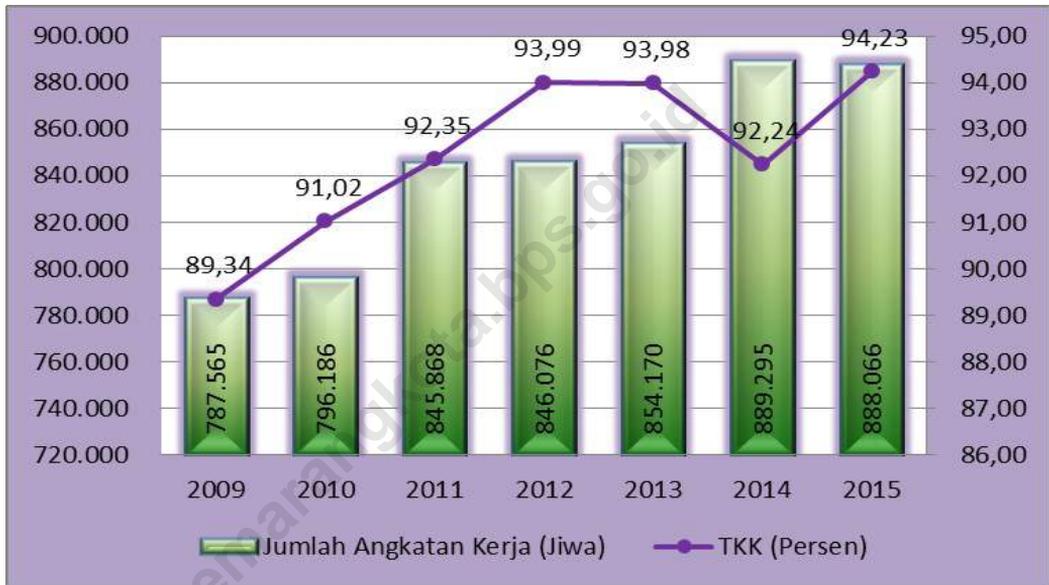


Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

4. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang mencerminkan potensi kekuatan ekonomi Kota Semarang. Jumlah angkatan kerja menunjukkan jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan persentase angkatan kerja yang bekerja.

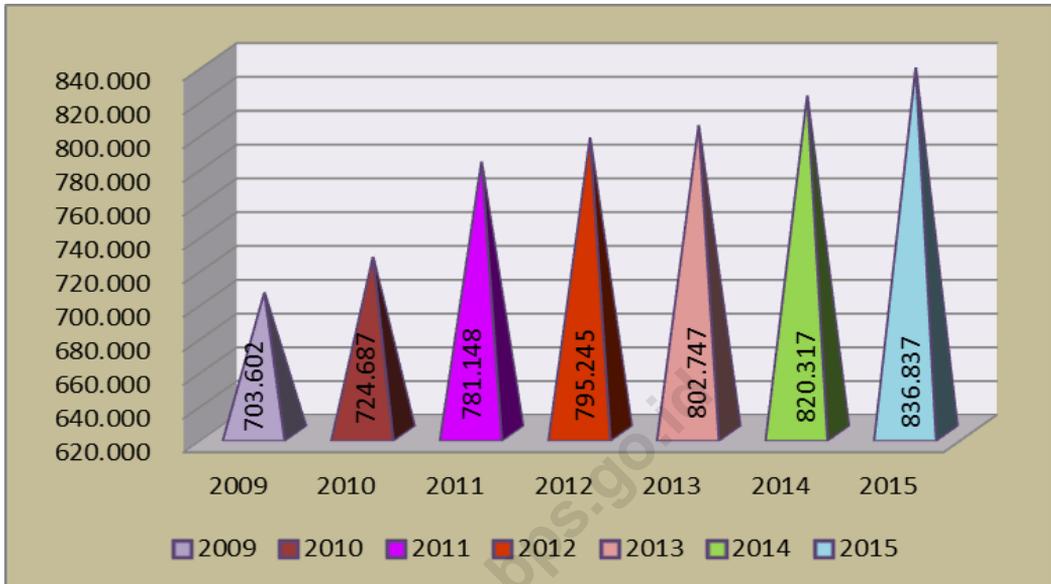
Gambar 3. Jumlah Angkatan Kerja dan TKK Kota Semarang, 2009 - 2015



Sumber: Hasil Sakernas BPS, diolah.

Baik jumlah angkatan kerja dan TKK cenderung dinamis dari tahun ke tahun. Menarik untuk dicermati, pada dua tahun terakhir, di saat jumlah angkatan kerja sedikit berkurang, TKK justru meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja tahun 2015 lebih baik daripada tahun 2014. Menarik juga untuk diketahui, fakta data TKK menunjukkan, tahun 2015 merupakan tahun terjadinya penyerapan tenaga kerja tertinggi di sepanjang tahun 2009 -2015. TKK tahun 2015 sebesar 94,23 persen memberikan arti bahwa 94,23 persen dari 888.066 angkatan kerja di Kota Semarang, yaitu sebanyak 836.837 jiwa, tercatat sebagai pekerja. Peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terlihat dalam grafik berikut.

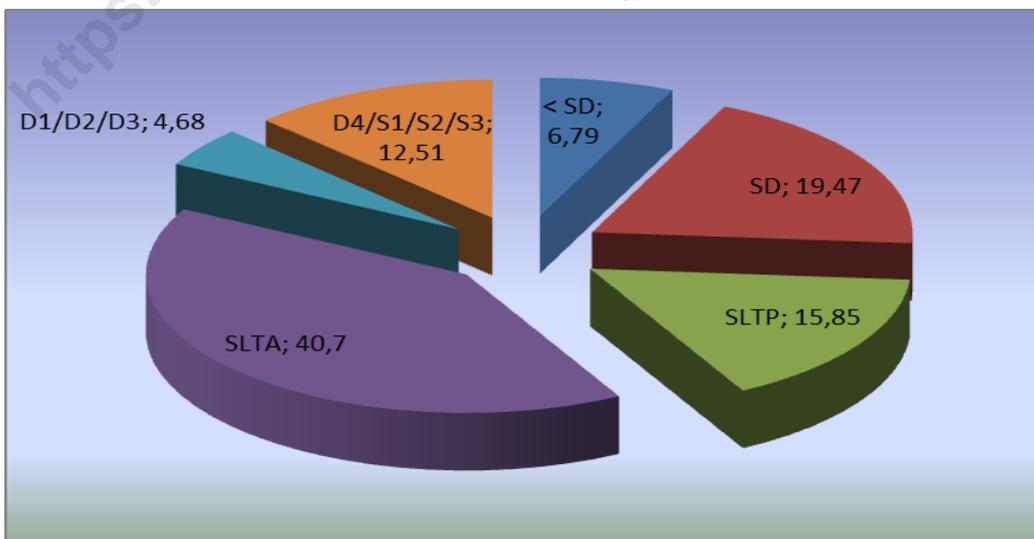
Gambar 4. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja di Kota Semarang, 2009 – 2015



Sumber: Hasil Sakernas BPS, diolah.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas tercermin dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2016, lebih dari separuh penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Kota Semarang berpendidikan tamat SLTA ke atas, tepatnya sebesar 57,89 persen.

Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Semarang Tahun 2016



Sumber: Inkesra Kota Semarang Tahun 2016

Selain tingkat pendidikan yang ditamatkan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat terlihat melalui indikator berikut:

Tabel 4. Indikator Pendidikan Kota Semarang

Uraian	2014	2015	2016
Angka Melek Huruf	97.34	96.4	97.28
Laki-laki	98.56	97.80	98.79
Perempuan	96.19	95.10	95.87
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.06	10.20	10.49
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7-12	99.21	98.83	98.41
13-15	95.10	96.63	98.59
16-18	75.33	80.49	83.56

Sumber: Statda Kota Semarang 2016

AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya (<https://sirusa.bps.go.id/>). AMH Kota Semarang tahun 2016 sebesar 97,28 persen memberi arti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang, 97, 28 atau setara dengan 97 jiwa mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menyatakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. (<https://sirusa.bps.go.id/>). RLS Kota Semarang tahun 2016 sebesar 10,49 artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang rata-rata telah menyelesaikan 10,49 tahun belajar dalam jenjang pendidikan formal atau setara dengan kelas 10.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum (<https://sirusa.bps.go.id/>). Untuk Kota Semarang, semua kelompok umur memiliki peluang yang besar dalam mengakses pendidikan, ditunjukkan dari nilai APS yang tinggi pada semua kelompok umur.

B. Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pengukuran PDRB dengan pendekatan produksi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan mengelompokkan unit-unit produksi menjadi 17 sektor atau lapangan usaha.

PDRB atas dasar harga berlaku bermanfaat untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah. Kategori ekonomi yang memiliki peranan atau kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku juga menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, demikian pula sebaliknya (BPS).

Tabel 5. Distribusi persentase PDRB atas Harga Berlaku di Kota Semarang Tahun 2012-2016

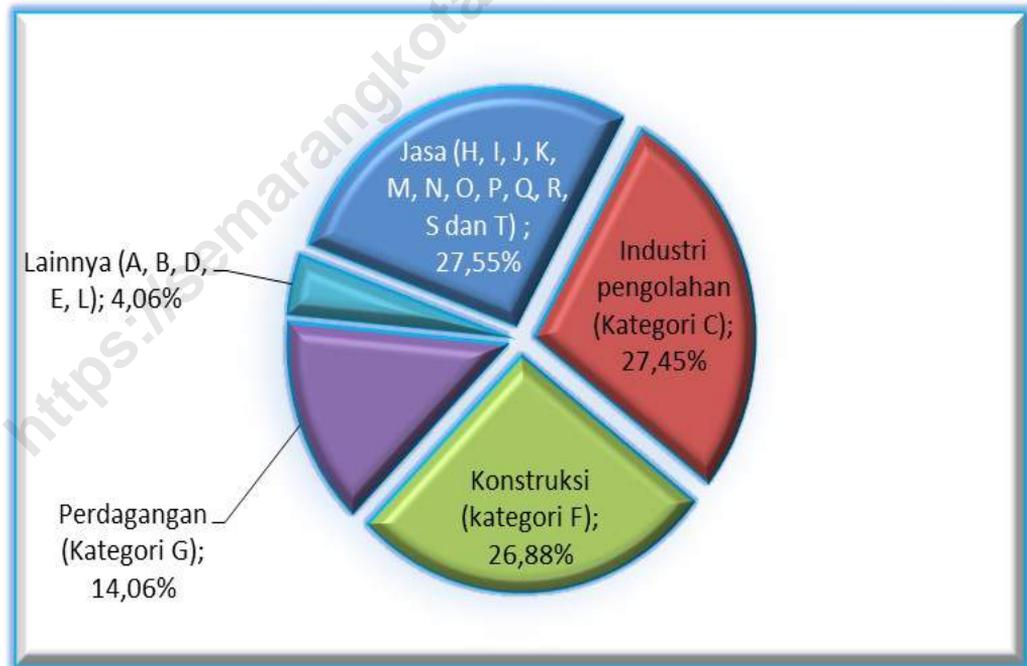
Kategori	Kategori / Subkategori	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.00	1.04	1.01	1.02	0.98
B	Pertambangan dan Penggalian	0.19	0.18	0.20	0.19	0.16
C	Industri Pengolahan	27.15	27.11	27.52	27.46	27.45
D	Pengadaan Listrik, Gas	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11
E	Pengadaan Air	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08
F	Konstruksi	26.71	26.68	26.84	27.04	26.88
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	15.18	14.93	14.39	14.12	14.06
H	Transportasi dan Pergudangan	3.27	3.48	3.69	3.84	3.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.24	3.35	3.39	3.39	3.24
J	Informasi dan Komunikasi	7.66	7.35	7.21	7.07	7.05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.41	4.45	4.33	4.42	4.59
L	Real Estate	2.70	2.69	2.71	2.75	2.74
M, N	Jasa Perusahaan	0.55	0.59	0.59	0.61	0.65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.53	3.48	3.32	3.31	3.27
P	Jasa Pendidikan	2.46	2.68	2.75	2.74	2.81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.69	0.72	0.74	0.76	0.77
R, S, T	Jasa lainnya	1.05	1.08	1.12	1.09	1.14
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO (PDRB)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang 2012-2016

Setidaknya, sepanjang tahun 2012 sampai 2016, lebih dari lima puluh persen PDRB kota Semarang disumbang oleh akumulasi dari sektor industri pengolahan dan konstruksi. Pada tahun 2016, industri pengolahan dan konstruksi tercatat memberi kontribusi, masing-masing sebesar 27,45 persen dan 26,88 persen dari total nilai tambah bruto kota Semarang. Kedua sektor tersebut merupakan penyokong utama perekonomian kota Semarang apabila terpilah menurut kategori. Namun demikian sektor jasa tidak dapat dipandang sebelah mata. Apabila diakumulasikan seluruh kategori pada sektor jasa, maka sektor jasa menjadi penopang utama perekonomian Kota Semarang, menggeser sektor industri pengolahan dan konstruksi. Kategori dominan berikutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G).

Gambar 6. Struktur Ekonomi Kota Semarang tahun 2016 menurut Lapangan Usaha (persen)



Sumber: BPS, PDRB Kota Semarang menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Sukirno (1981) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan struktur ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2016

tercatat sebesar 5,69 persen. Capaian tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen dan Jawa Tengah sebesar 5,28 persen.

Namun demikian, kemajuan pembangunan di suatu wilayah tidak hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi. Pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan suatu wilayah. Pembangunan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan karena tingkat pendapatan yang tinggi tanpa diikuti standar kesehatan dan pendidikan yang baik sama halnya dengan “pertumbuhan tanpa pembangunan” (Sari, 2016).

PBB mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan manusia. Konsep pembangunan manusia yang selanjutnya disebut PBB sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia.

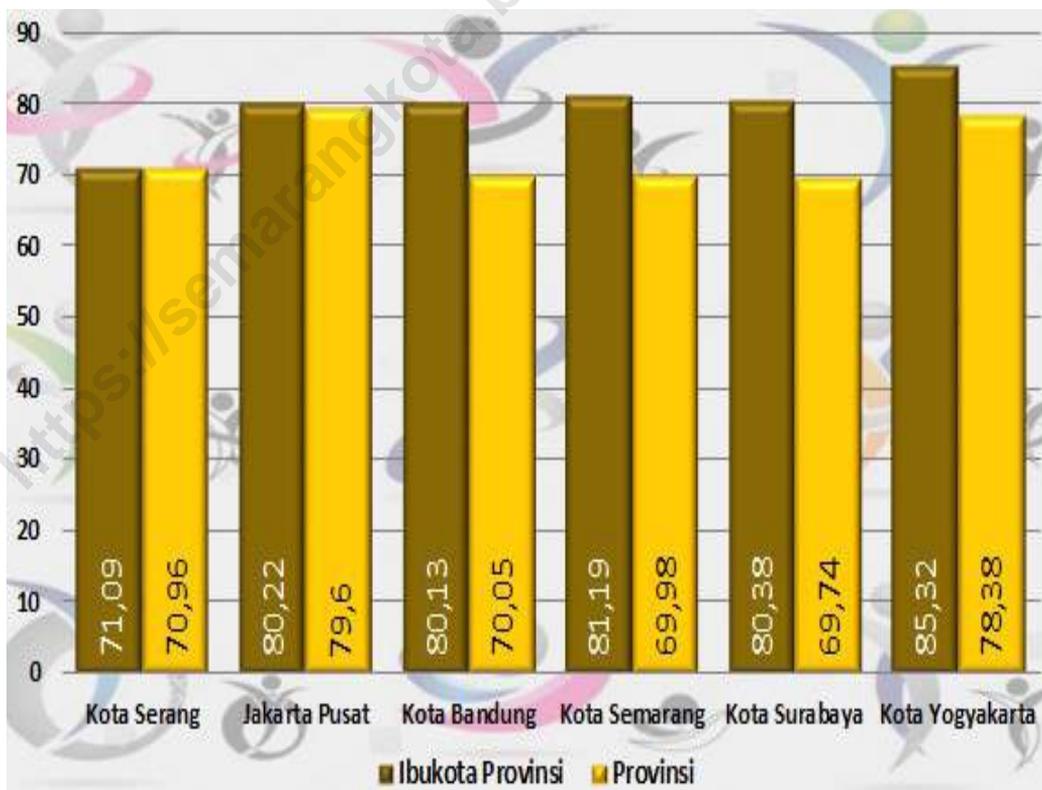
Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Magelang	74.47	75	75.29	75.79	76.39	77.16
Kota Surakarta	78	78.44	78.89	79.34	80.14	80.76
Kota Salatiga	78.76	79.10	79.37	79.98	80.96	81.14
Kota Semarang	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23	81.19
Kota Pekalongan	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69	73.32
Kota Tegal	70.03	70.68	71.44	72.20	72.96	73.55
Provinsi Jawa Tengah	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Ketika disejajarkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Semarang bersaing ketat dengan Kota Salatiga dan Surakarta. Sepanjang periode tahun 2011 sampai 2014, selain melampaui IPM Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Semarang juga selalu termasuk dalam kategori tinggi. Capaian IPM pada tahun terakhir menunjukkan prestasi membanggakan bagi Kota Semarang. Selain termasuk kategori sangat tinggi, IPM Kota Semarang menempati ranking tertinggi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan kembali melampaui angka IPM Provinsi. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian IPM tersebut menjadi suatu modal dan potensi tersendiri bagi Kota Semarang.

Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Ibukota Provinsi dan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016

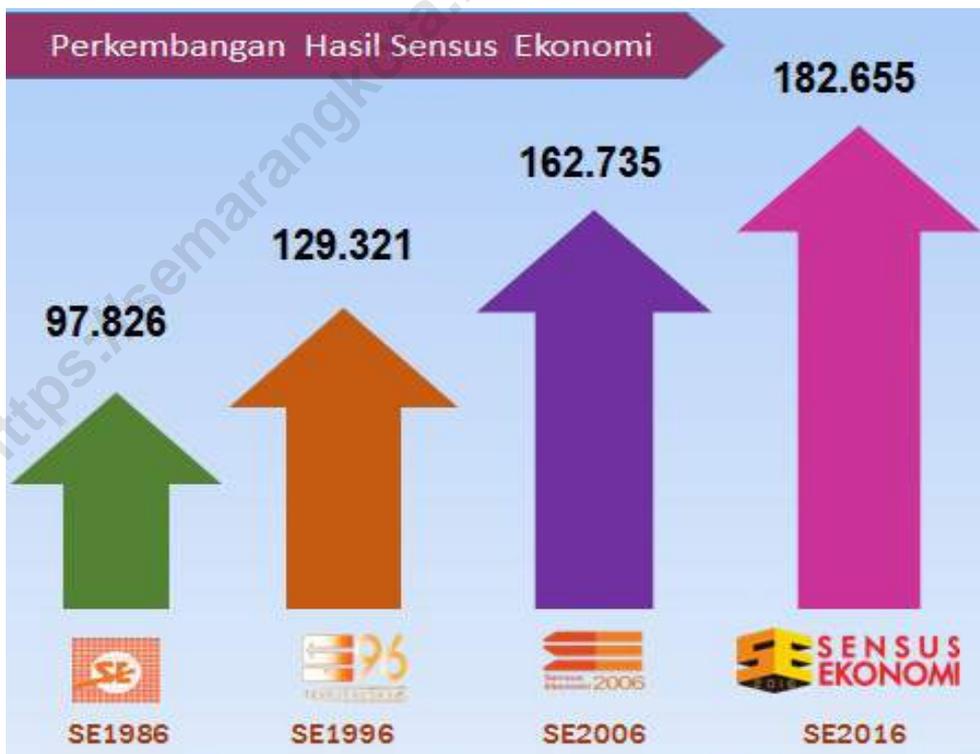


Sumber: BPS, diolah

Capaian IPM Kota Semarang dibandingkan dengan IPM Ibukota Provinsi beserta provinsinya se Pulau Jawa adalah yang terbaik ke dua setelah Kota Yogyakarta. Dapat diartikan, kualitas hidup masyarakat Kota Semarang termasuk kategori sangat baik. Kondisi tersebut menjadi satu potensi Kota Semarang untuk dapat lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.

Perkembangan perekonomian Kota Semarang dapat diketahui pula dari hasil Listing (pendaftaran usaha) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Hasil listing SE2016 menyebutkan bahwa bulan Mei 2016, jumlah usaha/perusahaan di Kota Semarang tercatat sebanyak 182.655 usaha/perusahaan. Dalam kurun waktu satu dekade, jumlah usaha/perusahaan di Kota Semarang meningkat sebesar 12,24 persen dibandingkan hasil listing SE2006 sebanyak 162.735 usaha/perusahaan.

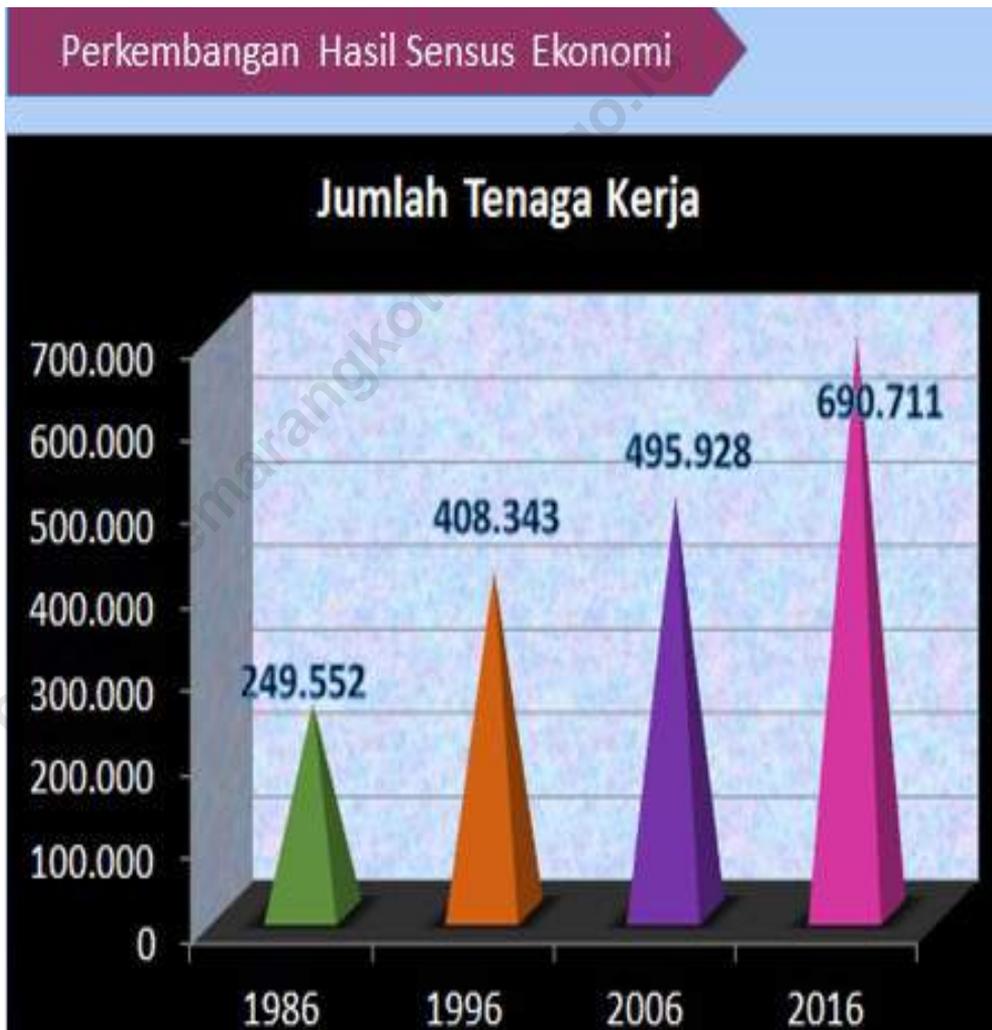
Gambar 8. Perkembangan Jumlah Usaha/Perusahaan Hasil SE



Sumber: Hasil SE BPS, diolah.

Di sisi lain, banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha/perusahaan di Kota Semarang, menurut SE2016 total tercatat sebanyak 690.711 orang tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tercatat dalam perkembangan hasil SE dari masa ke masa mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan tersebut berturut-turut sebesar 63,63 persen, 21,45 persen dan pada hasil SE terakhir yaitu SE2016, meningkat sebesar 39,28 persen dibandingkan SE2006 lalu, yang sebesar 495.928 tenaga kerja.

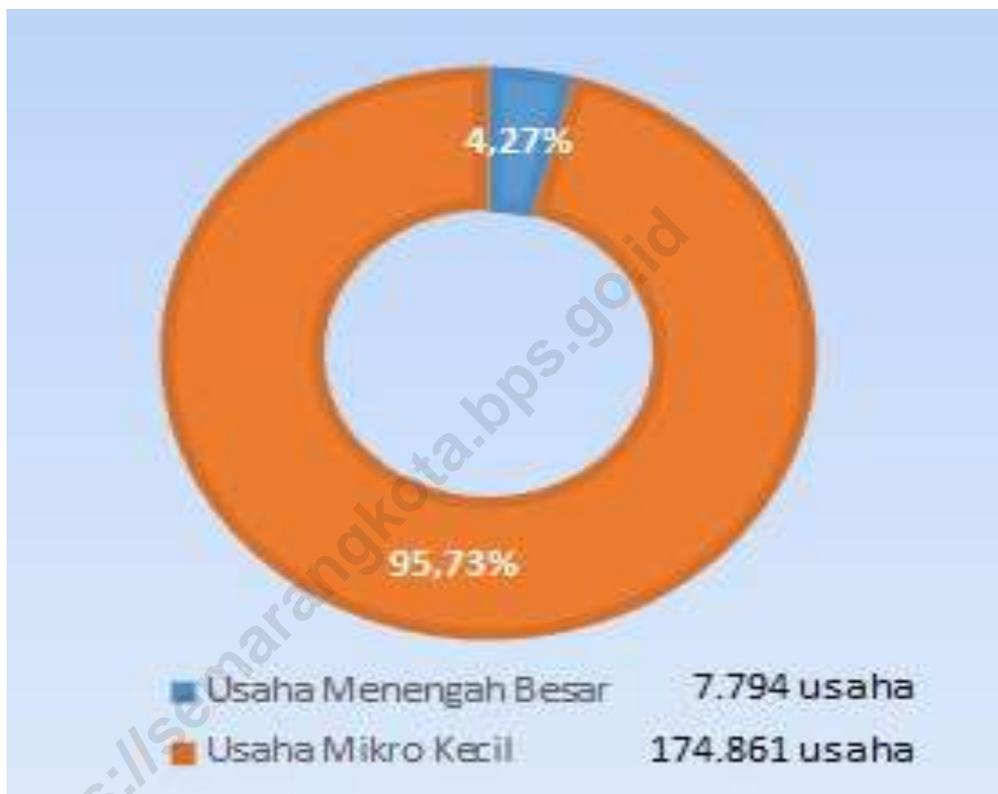
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Hasil SE



Sumber: Hasil SE BPS, diolah.

Secara kuantitas, Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha dominan Kota Semarang dengan proporsi sebesar 95,73 persen atau sebanyak 174.861 usaha. Selebihnya adalah usaha pada skala menengah besar, yaitu sebanyak 7.794 usaha.

Gambar 10. Jumlah dan persentase Usaha/Perusahaan Hasil SE2016



Sumber: Hasil SE2016 BPS, diolah.

Menarik untuk dicermati, ternyata Usaha Menengah Besar (UMB) yang secara kuantitas hanya 4,27 persen dari total jumlah usaha hasil SE2016 mampu menyerap hampir separuh tenaga kerja di Kota Semarang. Hasil SE2016 menunjukkan, total usaha UMB menyerap tenaga kerja sebanyak 345.097 orang, sementara UMK sebanyak 345.614 orang. Perimbangan komposisi penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi satu isyarat perlunya dukungan terhadap perkembangan usaha baik UMB maupun UMK di kota Semarang.

Gambar 11. Jumlah dan persentase Pekerja Hasil SE2016



Sumber: Hasil SE2016 BPS, diolah.

Hasil berikutnya dari SE2016 yang cukup menarik untuk dicermati adalah bahwa 84,13 persen dari aktivitas ekonomi yang dijalankan di Kota Semarang berasal dari kategori G sebesar 40,19 persen, kategori I sebesar 25,77 persen, kategori C sebesar 11,21 persen dan kategori R, S dan U (Jasa Lainnya) sebesar 7,13 persen. Kategori lain hanya berkontribusi sebesar 15,87% dari seluruh aktivitas ekonomi yang tercerminkan dari banyaknya usaha terpilah berdasarkan kategori.

Gambar 12. Jumlah Usaha Terbesar menurut Kategori, Hasil SE2016



Sumber: Hasil SE2016 BPS, diolah.

Terkait dengan penyerapan tenaga kerja menurut skala usaha UMB dan UMK di Kota Semarang, hasil SE2016 mencatat penyerapan tenaga kerja didominasi oleh kategori C pada skala usaha UMB dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 146.925 orang. Berikutnya oleh kategori G pada skala usaha UMK, menyerap tenaga kerja sebesar 114.886 orang. Penyerap tenaga kerja terbesar ketiga adalah kategori I pada skala usaha UMK, sebesar 77.764 orang. Berikutnya berturut-turut adalah kategori G pada skala usaha UMB sebesar 56.932 orang dan kategori C pada skala usaha UMK. Selibhnya, masing-masing untuk UMB dan UMK menyerap tenaga kerja kurang dari 30.000 orang pada tiap kategori.

Tabel 7. Jumlah dan Distribusi Usaha/Perusahaan Hasil SE2016

Lapangan Usaha		Usaha/Perusahaan			
		UMB	UMK	Jumlah	Distribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
B	Pertambangan dan Penggalian	0	55	55	0,03
C	Industri Pengolahan	732	19.736	20.468	11,21
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	24	292	316	0,17
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	16	905	921	0,50
F	Konstruksi	470	1.198	1.668	0,91
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.969	70.448	73.417	40,19
H	Pengangkutan dan pergudangan	1.004	4.797	5.801	3,18
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	339	46.732	47.071	25,77
J	Informasi Dan Komunikasi	152	4.063	4.215	2,31
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	930	743	1.673	0,92
L	Real Estat	142	3.231	3.373	1,85
M, N	Jasa Perusahaan	552	3.709	4.261	2,33
P	Pendidikan	225	3.784	4.009	2,19
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	71	1.193	1.264	0,69
R, S, U	Jasa lainnya	168	12.860	13.028	7,13
Jumlah		7.794	174.861	182.655	100,00

Sumber: Hasil SE2016 BPS, diolah.

Tabel 8. Jumlah dan Distribusi Tenaga Kerja Hasil SE2016

	Lapangan Usaha	Tenaga Kerja			
		UMB	UMK	Jumlah	Distribusi
	(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
B	Pertambangan dan Penggalian	0	81	81	0,01
C	Industri Pengolahan	146.925	45.464	192.389	27,85
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	166	484	650	0,09
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	586	1.724	2.310	0,33
F	Konstruksi	12.648	11.016	23.664	3,43
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	56.932	114.886	171.818	24,88
H	Pengangkutan dan pergudangan	20788	9.509	30.297	4,39
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	11209	77.764	88.973	12,88
J	Informasi Dan Komunikasi	5917	5.709	11.626	1,68
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	28023	4.625	32.648	4,73
L	Real Estat	3178	4.186	7.364	1,07
M, N.	Jasa Perusahaan	18366	11.000	29.366	4,25
P	Pendidikan	22108	29.546	51.654	7,48
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	14732	4.415	19.147	2,77
R, S, U	Jasa lainnya	2173	21.989	24.162	3,50
	Jumlah	345.097	345.614	690.711	100,00

Sumber: Hasil SE2016 BPS, diolah

Prestasi lain yang memberi nilai tambah dan diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan kota Semarang adalah terpilihnya kota Semarang dalam program 100 *Resilient Cities* (100RC) dari *Rockefeller Foundation* pada tahun 2015. Kota Semarang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang terpilih dalam program 100RC. Seratus kota terpilih akan menerima pendanaan dan sumber daya pembangunan dari *Rockefeller Foundation*.

Kota lain yang terpilih, di antaranya adalah New York, London, San Fransisco, Rio de Janeiro, Barcelona, Medelin, Rotterdam, Roma dan Melbourne. Sebagai penerima program 100 *Resilent Cities*, Kota Semarang berkesempatan bekerja sama dengan mitra-mitra 100RC seperti Microsoft, IDB, World Bank, Cities Alliance, RMS, dan Swiss Re, baik dalam bentuk pendanaan maupun kerangka studi, perencanaan, serta evaluasi program. Kesempatan emas ini membuka peluang bagi Kota Semarang untuk dapat membangun jaringan, berbagi informasi, kolaborasi serta mempraktikkan berbagai inovasi dalam penanganan persoalan yang diakibatkan perkembangan kota.

<https://semarangkota.bps.go.id>

bab 2



TANTANGAN EKONOMI
KOTA SEMARANG

Tantangan Ekonomi Kota Semarang

A. Karakter Topografi

Kota Semarang yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah memiliki kenampakan yang umumnya juga dimiliki oleh kota/ kabupaten lain yang berada di Pulau Jawa. Secara umum, Kota Semarang didominasi oleh dataran rendah pada bagian utara dan perbukitan di bagian selatannya. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Lebih dari enam puluh persen, tepatnya 65,22% wilayah kota Semarang adalah dataran dengan kemiringan 25%. Sisanya merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%.

Tabel 9. Luas Amblesan Tanah di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Amblesan (Ha)				
		0 - 2 cm/th	2 - 4 cm/th	4 - 6 cm/th	6 - 8 cm/th	> 8 cm/th
1	Semarang Selatan	0.67	-	-	-	-
2	Pedurungan	261.18	91.40	408.07	-	-
3	Genuk	483.62	504.30	445.54	103.26	544.07
4	Gayamsari	166.89	106.15	126.63	25.56	9.04
5	Semarang Timur	204.19	-	-	42.54	12.36
6	Semarang Utara	147.52	-	262.33	294.53	396.83
7	Semarang Tengah	69.34	250.08	28.86	-	-
8	Semarang Barat	-	403.68	11.63	-	-

Sumber: Bappeda Kota Semarang dalam RPJMD Kota Semarang 2016-2021

Kondisi topografi Kota Semarang menjadikan Kota Semarang memiliki karakteristik fisik alam yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Selain daerah perbukitan yang memiliki gerakan tanah menengah hingga tinggi, Kota Semarang juga memiliki daerah yang rawan terhadap amblesan tanah. Umumnya, daerah yang memiliki amblesan tanah merupakan daerah yang berada di dataran rendah dan daerah pantai yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu :

Kecamatan Semarang Selatan, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Barat. Berdasarkan Tabel 2.3, Kecamatan Genuk merupakan kecamatan yang memiliki amblesan tanah tertinggi tiap tahunnya diantara seluruh kecamatan di Kota Semarang (RPJMD Kota Semarang 2016-2021).

B. Kawasan Rawan Bencana

Secara global, perhatian terhadap perubahan iklim tertuang dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tujuan ke-13 yang berbunyi: *“Take urgent action to combat climate change and its impact”*. Oleh karenanya, dalam konteks pembangunan kota, perlu perhatian lebih terhadap perubahan iklim beserta dampaknya seperti kenaikan muka air laut dan bencana alam. Perubahan iklim secara langsung berdampak pada Kota Semarang.

Tabel 10. Lama dan Luasan Genangan Banjir dan Rob

No	Genangan Banjir	Satuan	Tahun	
			2014	2015
1	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	120	60
2	Panjang Sungai dan saluran drainase	meter	206.506	206.506
3	Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan)	Hektar	37.301	37.301
	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	76.405	77.405
4	Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob			
	- Lama Genangan	Menit	650	540
	- Tinggi Genangan	Cm	50	30
	- Lebar Genangan	Cm	12000	8300

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dalam RPJMD Kota Semarang 2016-2021

Kenaikan muka air laut dan amblesan tanah menjadikan Kota Semarang sering dilanda rob dan banjir pada periode tertentu. Sebagai kota pesisir utara Jawa, Semarang mengalami berbagai tantangan tidak hanya daerah rawan terhadap amblesan tanah, namun juga rob akibat kenaikan muka air laut dan erosi.

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011- 2031 Kota Semarang menyebutkan bahwa Kota Semarang memiliki kawasan rawan bencana yang terdiri dari kawasan rawan rob, kawasan rawan banjir, rawan longsor dan rawan gerakan tanah. Di wilayah Kota Semarang, daerah yang berpotensi rawan bencana banjir meliputi sebagian Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Genuk.

Tabel 11. Sebaran Daerah Rawan Longsor dan Gerakan Tanah

Keterangan	Daerah Rawan Longsor dan Gerakan Tanah
(1)	(2)
Daerah Rawan Longsor (Lahan dengan kelerengan >40%)	Kecamatan Gajahmungkur
	Kecamatan Candisari
	Kecamatan Tembalang
	Kecamatan Banyumanik
	Kecamatan Gunungpati
	Kecamatan Mijen
	Kecamatan Ngaliyan
Daerah Gerakan Tanah	Kecamatan Banyumanik
	Kecamatan Gunungpati
Daerah Sesar Aktif (Daerah potensial terjadi gerakan tanah)	<ul style="list-style-type: none"> • Di sepanjang Kecamatan Mijen dan Gunungpati yaitu melalui Kelurahan Sumurejo, Mangunsari, Gunungpati, Purwosari,
	Limbangan, dan Cangkiran.
	<ul style="list-style-type: none"> • Di sepanjang Kecamatan Banyumanik, yaitu melalui Kelurahan Jabungan, Padangsari, Plalangan, Sumurboto dan Tinjomoyo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gunungpati, yaitu melalui Kelurahan Sukorejo, Kalipancur dan Bampakerep.

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2016-2021

C. Kondisi Keamanan dan Kesejahteraan Rakyat

Kemajuan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari upaya semua pihak di segala bidang. Selain memperhatikan potensi berbagai sumber daya, suatu wilayah juga harus menciptakan kondisi kewanaman yang kondusif. Pengaruh keamanan yang belum stabil akan mempengaruhi kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 12. Jumlah Kejahatan menurut Jenis di Kota Semarang Tahun 2014-2015

No	JENIS KEJAHATAN	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembunuhan	10	6	9
2	Penganiayaan Berat (Anirat)	172	165	91
3	Penganiayaan Ringan (Anira)	66	73	76
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	88	53	41
5	Perkosaan	4	6	1
6	Pencabulan	16	8	3
7	Penculikan	4	1	0
8	Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	89	54	43
9	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	4	188	151
10	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	620	672	512
11	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	436	510	336
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	36	17	8
13	Pembakaran Dengan Sengaja	0	2	1
14	Narkotika Dan Psikotropika	80	14	12
15	Pembakaran Dengan Sengaja	448	193	102
16	Penggelapan	450	355	239
17	Korupsi	0	2	2
18	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0
Jumlah		2.523	2.319	1.627

Sumber: Polrestabes Kota Semarang

Secara keseluruhan, jumlah jumlah kejahatan makin menurun dari tahun 2014 ke 2016. Namun beberapa item menunjukkan kondisi yang kurang stabil. Stabilitas keamanan sangat diperlukan dalam menjamin keamanan berinvestasi. Investor tidak akan berani menanamkan modal di wilayah yang kondisi keamanannya tidak kondusif.

Tabel 13. Jumlah Kejahatan yang Tercatat di Kepolisian dan Jumlah Kejahatan yang Terselamatkan di Kota Semarang

Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan	1.427	1.752	2.082
Jumlah yang terselesaikan	763	739	917

Sumber: Polrestabas Kota Semarang dalam Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2016

Terdapat peningkatan jumlah kejahatan di Kota Semarang selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Akan tetapi jumlah kejahatan yang terselesaikan hanya sekitar 40-50 persen dari total kasus. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kota Semarang, khususnya para penegak hukum untuk dapat meningkatkan kualitas kinerjanya agar tercapai kondisi keamanan yang stabil dan kondusif.

Kestabilan perekonomian suatu wilayah, tak lepas dari dukungan kondisi keamanan yang kondusif. Kondisi keamanan yang kondusif akan tercapai jika kesejahteraan rakyat terjamin. Potret kesejahteraan rakyat dapat diketahui antara lain dari kemiskinan, per-kembangan konsumsi rumah tangga dan pengangguran. Konsep kemiskinan dinyatakan oleh Amartya Sen (1983) dalam Hasbullah (2012) sebagai kapabilitas personal (*person's capabilities*), yaitu seseorang yang seharusnya memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai/menjalankan seperangkat fungsinya sebagai manusia dalam hidup dan kehidupannya. Sedangkan Artkinson dan Bourguignon (1999) dalam Hasbullah (2012) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakcukupan kekuatan untuk mengakses sumber daya ekonomi.

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P₁, P₂, Garis Kemiskinan dan TPT Kota Semarang Tahun 2011 - 2016

Tahun	JUMLAH (000)	PERSENTASE	P1 (%)	P2 (%)	RATA-RATA PENGELUARAN (Rp/Kap/Bulan)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	88,5	5,68	0,71	0,18	749.403	7,65
2012	83,3	5,13	0,8	0,19	760.648	6,01
2013	86,7	5,25	0,65	0,13	1.070.471	6,02
2014	84,7	5,04	0,47	0,08	1.058.225	7,76
2015	84,3	4,97	0,5	0,09	1.297.896	5,77
2016	83,59	4,85	0,76	0,18	1.375.419	5,77*

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan, P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan, TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka. *Kondisi tahun 2015. Angka ketenagakerjaan tahun 2016 hanya sampai level Provinsi dan Nasional.

Sumber data:

1. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2011 – 2016
2. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015
3. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2016
4. Statda Kota Semarang 2016

Permasalahan kemiskinan tidak hanya mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan diharapkan mampu tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin. Kebijakan terkait pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index / P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kata lain makin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index / P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dalam makna lain, makin tinggi nilai P₂, maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang demikian pula sebaliknya.

Indeks kedalaman dan keparahan Kota Semarang berfluktuasi di sepanjang enam tahun terakhir. Kondisi demikian menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diharapkan konsisten menurunkan angka kemiskinan, baik secara jumlah, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Terkait pengangguran, terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami bersama. Konsep dan definisi dasar yang digunakan oleh BPS merupakan rekomendasi PBB untuk menjaga keterbandingan data dengan negara lain. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan tergolong sebagai angkatan kerja.

Ibu-ibu rumahtangga yang murni mengurus rumahtangga, anak-anak sekolah dan mahasiswa yang hanya bersekolah, dalam arti tidak melakukan aktivitas yang digolongkan sebagai konsep bekerja, tergolong sebagai “bukan angkatan kerja”, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan bekerja atau menganggur. Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja.

TPT Kota Semarang cukup berfluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir TPT Kota Semarang mengalami penurunan cukup signifikan, dari 7,76 persen menjadi 5,77 persen. Menjadi tantangan Pemerintah Kota Semarang untuk dapat menurunkan TPT secara konsisten sampai ke *zero value* untuk mewujudkan *full employment* dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Semarang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan rata-rata pengeluaran tersebut harappannya merupakan bagian dari peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu cermin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun perlu dicermati lebih jauh. Apakah pengeluaran rata-rata per kapita per bulan lebih banyak didominasi pengeluaran makanan atau non makanan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, makin membaik tingkat perekonomian penduduk. Sebaliknya, semakin besar persentase pengeluaran untuk makanan, semakin kurang sejahtera penduduk di suatu wilayah. Komposisi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Kota Semarang tersaji melalui tabel berikut.

Tabel 15 . Rata-Rata Pengeluaran Per-kapita Sebulan dan Komposisinya Tahun 2011 - 2016

Tahun	Rata-Rata Pengeluaran per-kapita sebulan (Rp)	Persentase	
		Makanan	Non Makanan
2016	1.375.419	39,22	60,78
2015	1.297.895	33,71	66,29
2014	1.058.225	40,28	59,72
2013	1.070.470	37,29	62,71
2012	760.649	43,36	56,64
2011	749.403	40,75	59,25

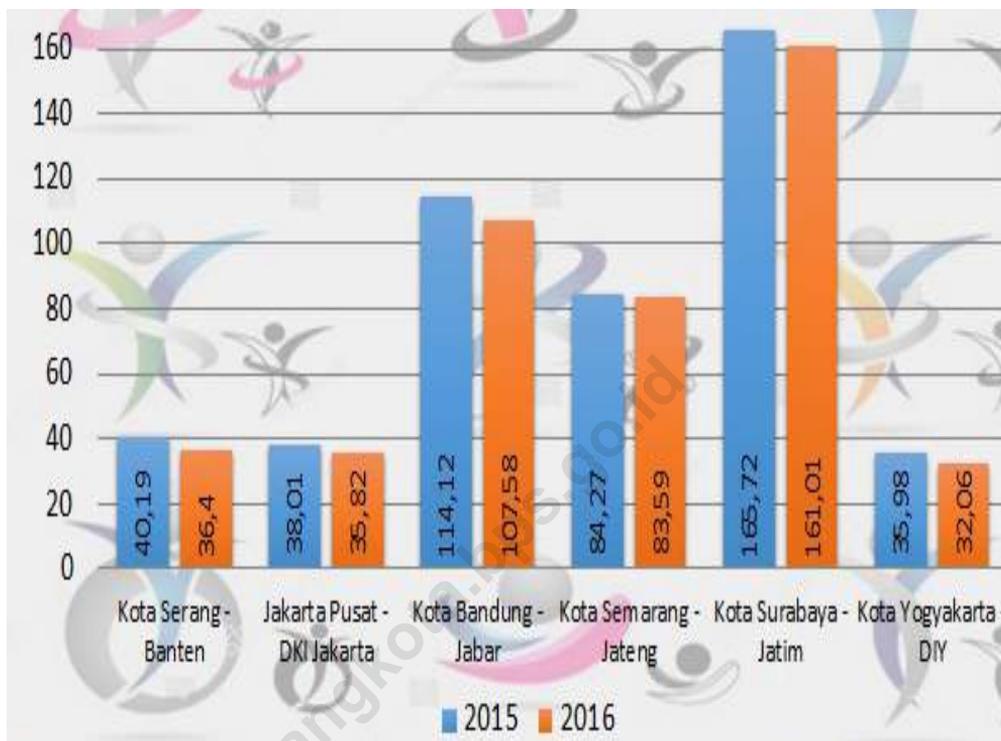
Sumber:

Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015
Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2016

Informasi mengenai pengeluaran per kapita per bulan merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan, porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hasil penelitian Novita dan Mukhyar (2011), Rachman dan Wahida (1998), Suryana dkk. (1988) dalam Subarna (2012) menyatakan bahwa komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah.

Walaupun sedikit berfluktuasi di sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2016, porsi pengeluaran non makanan penduduk di Kota Semarang selalu lebih tinggi daripada non makanan. Kondisi ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang untuk konsisten meningkatkan konsumsi non makanan penduduknya, menggeser konsumsi makanan. Peningkatan pendapatan tidak lagi digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan namun digunakan untuk konsumsi non makanan, menabung atau berinvestasi.

Gambar 13. Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) antar Ibukota Provinsi se Pulau Jawa Tahun 2015 dan 2016

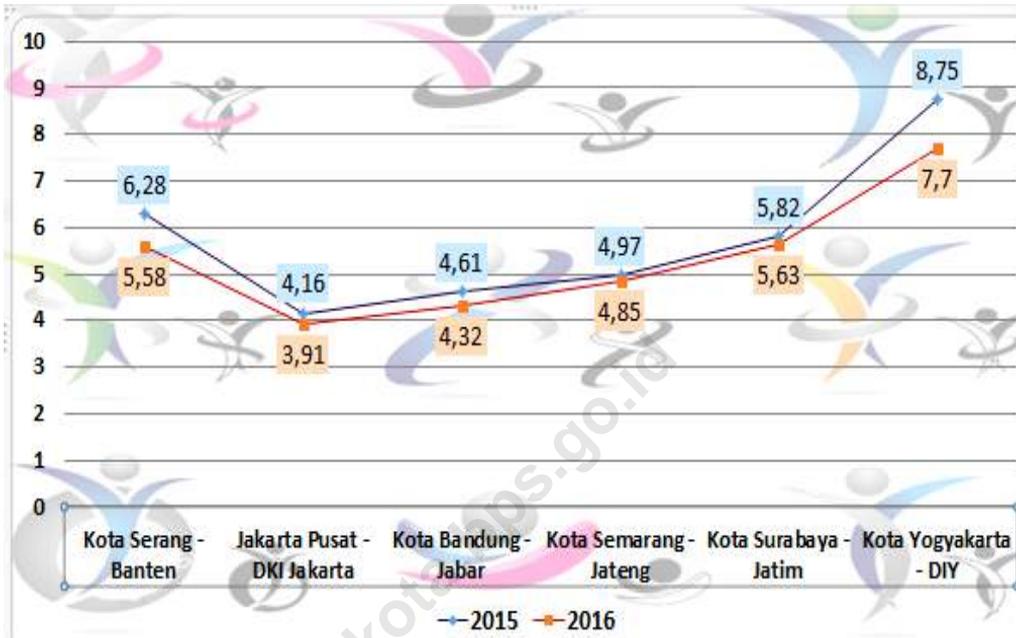


Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2015 – 2016

BPS mengategorikan penduduk miskin sebagai mereka yang nilai konsumsi makannya kurang dari 2.100 kilo kalori (kkal) per orang per hari ditambah kebutuhan primer non makanan. Ukuran pendekatan kalori yang digunakan BPS merupakan kesepakatan dunia. Dalam pertemuan di Roma tahun 2001, FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan WHO (*World Health Organization*) merekomendasikan bahwa batas minimal kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja berdasarkan konsumsi makanan 2.100 kkal ditambah dengan kebutuhan paling dasar non makanan.

Apabila jumlah penduduk miskin dibandingkan antar Ibukota Provinsi se Pulau Jawa dalam kurun waktu tahun 2015-2016, Kota Semarang berada di posisi pertengahan. Jumlah penduduk miskin Kota Semarang masih lebih rendah daripada Kota Bandung dan terutama Kota Surabaya namun lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di Kota Serang, Jakarta Pusat dan Yogyakarta.

Gambar 14. Persentase Penduduk Miskin antar Ibukota Provinsi se Pulau Jawa Tahun 2015 dan 2016



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2015 – 2016

Menarik untuk dicermati, bahwa meskipun Kota Semarang masih berada dalam posisi pertengahan diantara Ibukota Provinsi se-Pulau Jawa, data menunjukkan bahwa urutan jumlah penduduk miskin di Ibukota Provinsi se Pulau Jawa tidak seluruhnya berbanding lurus dengan urutan persentase penduduk miskin. Artinya, walaupun secara jumlah, penduduk miskin di Kota Surabaya merupakan yang tertinggi tidak secara otomatis tertinggi pula secara persentase. Fakta data menyatakan bahwa justru Kota Yogyakarta yang penduduk miskinnya paling sedikit secara jumlah, menempati ranking tertinggi dalam hal persentase penduduk miskin.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) antar kota se-Jawa Tengah Tahun 2011 – 2016

Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Magelang	13,1	12,3	11,8	11	10,9	10,64
Kota Surakarta	64,5	60,7	59,7	55,9	55,7	55,91
Kota Salatiga	13,3	12,6	11,5	10,8	10,6	9,73
Kota Semarang	88,5	83,3	86,7	84,7	84,3	83,59
Kota Pekalongan	28,3	27,3	24,1	23,6	24,1	23,65
Kota Tegal	25,9	24,4	21,6	20,9	20,3	20,26

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2011 – 2016

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang memang menurun dari tahun ke tahun. Namun secara jumlah tidak pernah kurang dari angka delapan puluh ribu jiwa. Penduduk miskin Kota Semarang juga selalu tertinggi secara jumlah dibandingkan dengan kota lain se-Jawa Tengah. Berbicara mengenai kemiskinan, karakteristik penduduk miskin tiap wilayah bisa jadi berbeda. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah belum tentu sesuai jika diterapkan di wilayah lain yang berbeda jauh karakteristiknya. Pengetahuan terhadap karakteristik penduduk miskin di suatu wilayah akan bermanfaat agar program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dapat tepat sasaran. Karakteristik penduduk miskin Kota Semarang dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 17. Karakteristik penduduk miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Bekerja

Keterangan		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	<SD	21,93	10,11	25,47	22,73	22,71
	TAMAT SD/SLTP	48,12	53,32	47,6	41,06	47,81
	SLTA+	29,95	36,57	26,93	36,21	29,48
TOTAL		100	100	100	100	100
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja	TDK BEKERJA*	28,05	35,72	41,01	32,7	42,1
	BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL	29,61	39,48	36,64	29,5	17,2
	BEKERJA DI SEKTOR FORMAL	42,34	24,8	22,35	37,8	40,7
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber: BPS. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2012 – 2016

* Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Kemiskinan dan pendidikan merupakan isu sentral yang berpola seperti lingkaran setan (Azra, 1999). Kemiskinan menjadi penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan pendidikan yang memadai. Ataupun pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak mampu bersaing dalam memperebutkan kesempatan kerja sehingga menjerumuskannya dalam kemiskinan. Namun demikian, Suryawati (2005) berpendapat bahwa pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Pendidikan yang memadai akan memberikan harapan masa depan yang lebih cerah, keluar dari belenggu kemiskinan.

Berdasar karakteristik dari sisi pendidikan, dapat diketahui dari tabel bahwa sepanjang tahun 2012 -2016, lebih dari 60 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang hanya mampu mengenyam pendidikan sampai SMP ke bawah (tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SMP).

Sedangkan jika diperhatikan berdasarkan status bekerja, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang berfluktuasi sepanjang tahun 2012 sampai 2016 dalam hal komposisi tidak bekerja, bekerja di sektor formal maupun informal. Setiap item komposisi status bekerja, walaupun berfluktuasi selama tahun 2012 sampai 2016, menarik untuk dicermati. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang berstatus tidak bekerja, setelah turun sebesar 8,31 persen di tahun 2015, kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 9,4 persen. Sementara penduduk miskin dengan status bekerja di sektor informal cenderung turun signifikan sejak tahun 2014. Sebagian karena terserap di sektor formal, sebagian lagi karena berstatus tidak bekerja. Status tidak bekerja yang dimaksud termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja. Ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga, anak-anak sekolah dan mahasiswa yang hanya bersekolah, tidak melakukan aktivitas bekerja termasuk di dalamnya. Jika dikaitkan dengan karakteristik pendidikan, status tidak bekerja bisa saja disebabkan penduduk miskin sedang mencari jenis pekerjaan yang sesuai. Baik sesuai dengan minat, keterampilan maupun sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Hal ini bisa terjadi bagi penduduk miskin yang memiliki jenjang pendidikan lebih baik dari sekedar tamatan SMP. Pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja (BPS, 2016).

Tabel 18. Karakteristik Penduduk Miskin di Kota Semarang menurut Persentase Pengguna Air Bersih, Pengguna Jamban Sendiri/Bersama, Pengeluaran Perkapita per Bulan untuk Makanan dan Sektor Bekerja

Keterangan		TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pengguna Air Bersih dan Jamban Sendiri/Bersama, Pengeluaran Perkapita per Bulan untuk Makanan Rumah Tangga Miskin	Pengguna Air Bersih (%)	82,12	83,58	84,82	94,16	98,62
	Pengguna Jamban Sendiri / Bersama (%)	95,71	94,99	90,55	92,21	97,95
	Pengeluaran Perkapita per Bulan untuk Makanan (%)	59,25	56,4	57,98	56,91	57,54

tabel berlanjut

(Lanjutan) Tabel 18. Karakteristik Penduduk Miskin di Kota Semarang menurut Persentase Pengguna Air Bersih, Pengguna Jamban Sendiri/Bersama, Pengeluaran Perkapita per Bulan untuk Makanan dan Sektor Bekerja

Keterangan	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TDK BEKERJA*	28,05	35,72	41	32,7	42,1	
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja	BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN	0	2,69	8	3,3	4,44
	BEKERJA BUKAN DI SEKTOR PERTANIAN	71,95	61,59	51	64	53,46
	TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: BPS. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2012 – 2016

* Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Terkait dengan karakteristik perumahan, beberapa indikator rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan diantaranya memiliki ketersediaan air bersih dan penggunaan jamban sendiri/bersama. Berdasarkan penghitungan dari data Susenas, persentase rumah tangga miskin di Kota Semarang yang menggunakan air bersih semakin meningkat sepanjang kurun waktu tahun 2012 sampai 2016. Demikian pula dengan penggunaan jamban sendiri/bersama, walaupun sempat menurun persentasenya pada periode tahun 2013 dan 2014, di tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan. Angka 98,62 persen untuk pengguna air bersih dan 97,95 persen untuk pengguna jamban sendiri/bersama pada tahun 2016 menunjukkan tinggal kurang dari tiga persen saja dari rumah tangga miskin yang belum memiliki rumah yang sehat dengan indikator ketersediaan air bersih dan penggunaan jamban sendiri/bersama.

Masyarakat berpendapatan rendah akan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Semakin tinggi pengeluaran non-makanan menunjukkan indikasi adanya perbaikan kesejahteraan penduduk.

Sebaliknya, semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan, semakin kurang sejahtera penduduk di wilayah tersebut (Hardjana, 1994 dalam Subarna, 2012). Karakteristik penduduk miskin Kota Semarang terkait persentase pengeluaran perkapita per bulan untuk makanan dapat diketahui dari series data dari tahun 2012 sampai 2016 pada table 18. Data menunjukkan bahwa porsi pengeluaran untuk makanan bagi penduduk miskin Kota Semarang dari tahun ke tahun masih lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan. Kondisi tersebut wajar terjadi. Dalam kondisi pendapatan terbatas maka pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah akan terlihat sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk pengeluaran makanan (Sukirno 2000). Namun demikian, dapat dicermati melalui table 18, bahwa meskipun persentase pengeluaran makanan penduduk miskin berfluktuatif pada periode tahun 2012-2016 namun selalu melebihi 55 persen dari total pengeluaran.

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kondisi penduduk miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Sesuai dengan ciri masyarakat perkotaan, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang lebih banyak bergerak di sektor non pertanian sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2016.

Terkait kemiskinan, penerima Nobel Ekonomi tahun 2000, James Heckman menemukan variabel-variabel nonkognitif yang justru tak diberikan di sekolah menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Variabel itu adalah keterampilan meregulasi diri, mulai dari mengendalikan perhatian dan perbuatan, sampai kemampuan mengelola daya tahan (persistensi), menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, dan kecenderungan untuk menjalankan rencana. Keterampilan-keterampilan seperti itu, menurut Heckman, sering kali tidak diperoleh dalam sekolah kognitif. Tanpa keterampilan tersebut, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga menengah ke atas pun akan jatuh pada lembah kemiskinan (Kasali, 2014). Permasalahan kemiskinan merupakan suatu tantangan tersendiri dalam pembangunan suatu wilayah. Kemiskinan membutuhkan penanganan komprehensif dengan memperhatikan berbagai dimensi dan karakteristiknya.

bab 3



Pengembangan Potensi Ekonomi Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan

Pengembangan Potensi Ekonomi Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan

A. Optimalisasi Sektor Potensial

Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, mengurangi dan akhirnya menghapus tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Selain itu Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih. Nilai-nilai pokok tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999: 3) – pemenang Nobel Ekonomi 1998 - bahwa *'development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy'*.

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi sangat luas, bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan PDRB per tahun. Pembangunan ekonomi bersifat multi-dimensi mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2014).

Tabel 19. Capaian Ekonomi kota Semarang Tahun 2012-2016

Keterangan	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Kontribusi PDRB (%)					
C. Industri Pengolahan	27,15	27,11	27,52	27,46	27,45
F. Konstruksi	26,71	26,68	26,84	27,04	26,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,18	14,93	14,39	14,12	14,06
M, N, O, P, Q, R, S dan U (Jasa-Jasa)	8,28	8,55	8,52	8,51	8,64
J. Informasi dan Komunikasi	7,66	7,35	7,21	7,07	7,05
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,41	4,45	4,33	4,42	4,59
H. Transportasi dan Pergudangan	3,27	3,48	3,69	3,84	3,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,24	3,35	3,39	3,39	3,5
Lainnya (Kategori A, B, D, E, L)	4,10	4,10	4,11	4,15	4,06
Total	100	100	100	100	100
• Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,97	6,25	6,31	5,80	5,69
• PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	61,70	66,20	73,00	78,90	84,40

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang 2012-2016, diolah.

*= Angka Sementara

**= Angka Sangat Sementara

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional dalam suatu negara. Struktur PDRB sepanjang periode tahun 2012-2016 menyatakan bahwa penyokong utama perekonomian Kota Semarang diperoleh dari sektor lapangan usaha industri pengolahan atau kategori C diikuti oleh kategori Konstruksi (F), kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (G), kategori jasa-jasa (M, N, O, P, Q, R, S dan U), kategori Informasi dan Komunikasi (J).

Sementara peranan sektor atau kategori lainnya di bawah 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang walaupun agak berfluktuatif namun masih berkisar di sekitar 5 sampai 6 persen dalam lima tahun terakhir. PDRB per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya memberikan prospek kondisi perekonomian yang menggembirakan.

Tabel 20. Beberapa Indikator Terpilih Kota Semarang

Tahun	TKK	Persentase Penduduk Miskin	Rasio Gini	TPT	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	92,35	5,68	0,3545	7,65	77,58
2012	93,99	5,13	0,3518	6,01	78,04
2013	93,98	5,25	0,3514	6,02	78,68
2014	92,24	5,04	0,3128	7,76	79,24
2015	94,23	4,97	0,4375	5,77	80,23
2016	94,23*	4,85	0,4375*	5,77*	81,19

*Kondisi tahun 2015. Angka ketenagakerjaan tahun 2016 hanya sampai level Provinsi dan Nasional.

Sumber: BPS, diolah.

Optimalisasi pembangunan berbasis potensi yang dimiliki sudah semestinya menjadi prioritas. Untuk keperluan perencanaan pembangunan berbasis optimalisasi sektor unggulan dibutuhkan data yang akan menjadi acuan bagi penentuan program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) adalah pendaftaran rumahtangga SE 2016 (SE2016-L). Hasil SE2016-L merupakan data dasar yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan potensi kegiatan usaha di Kota Semarang. Hasil SE2016-L terpilih berdasarkan kategori dapat menggambarkan potensi ekonomi Kota Semarang di luar sektor pertanian secara lengkap. Ketersediaan data yang lengkap apabila ditunjang oleh alat dan metode yang tepat akan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Terkait metode pengukuran potensi ekonomi di suatu wilayah, terdapat tiga metode pengukuran yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.
2. *Input – Output Approach*: yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.
3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan

Pengukuran potensi ekonomi di suatu wilayah berdasarkan data SE2016 dapat menggunakan pendekatan teori *Economic Base Approach*. Teori ini didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar wilayah terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Pengukuran potensi ekonomi berdasar pendekatan *economic base* menjelaskan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah merupakan *basic* (sektor unggulan) dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basic* / bukan sektor unggulan) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Hoover, 1984). Menurut teori ini, semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *nonbasic*, yang mencakup aktivitas-aktivitas pendukung bersifat melayani aktivitas di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic* (Bendavid-Val, 1991). Teori pertumbuhan berbasis ekonomi menyatakan gagasan bahwa pertumbuhan perekonomian lokal mensyaratkan peningkatan aliran uang masuk dan cara yang efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah dengan menambah ekspor (Blair, 1991; Hoover, 1984). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

B. Penentuan Sektor Unggulan

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain Location Quotient (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut dapat dilihat di catatan teknis. Sementara itu, RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 telah menetapkan beberapa lapangan usaha sebagai sektor unggulan. Sektor unggulan pada RPJMD Kota Semarang ditentukan berdasarkan berbagai aspek kondisi Kota Semarang, potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, serta posisi geografis strategisnya.

Visi pembangunan daerah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang 2016-2021 adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Sesuai visi dan berbagai aspek kondisi Kota , reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; PenySemarang, maka sektor unggulan sesuai RPJMD adalah kategori Perdagangan besar dan eceranediaan Akomodasi & Makan Minum; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta jasa lainnya. Sektor Industri sebagai penopang utama perekonomian Kota Semarang pun menjadi bagian dari sektor unggulan Kota Semarang.

Gabungan dari metode statistik dengan sektor unggulan menurut RPJMD kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor unggulan, sektor potensi dan bukan sektor unggulan maupun potensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinyatakan sebagai sektor unggulan apabila kategori lapangan usaha memenuhi ketiga syarat berikut:
 - a. Hasil perhitungan analisis LQ > 1 , dalam tabel 21 dinyatakan dengan notasi positif (+).
 - b. Salah satu dari hasil analisis *shift-share*, MRP maupun Klassen dinyatakan dengan notasi positif (+) dalam tabel 21.
 - c. Merupakan sektor unggulan dalam RPJMD.

2. Sektor potensi apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Kategori lapangan usaha termasuk sektor unggulan dalam RPJMD.
 - b. Hasil perhitungan analisis LQ > 1, dalam tabel 21 dinyatakan dengan notasi positif (+) dan salah satu dari ketiga hasil analisis bernotasi positif (+) dalam tabel 21, walaupun tidak dinyatakan sebagai sektor unggulan menurut RPJMD.
 - c. Bukan merupakan sektor unggulan maupun potensi apabila tidak memenuhi kriteria 1 atau 2.

Tabel 21. Hasil Analisis *Economic Based Approach* Kota Semarang Tahun 2016

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klassen	RPJ MD	Keterangan
		Ps	Ds	RPip (Analisis)	RPin (Referensi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. Pertambangan dan penggalan		+			+			
C. Industri Pengolahan			+	+		+	+	Potensi
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin		+	+	+	+	+		
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi						+		
F. Konstruksi	+					+		Potensi
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor							+	Potensi
H. Pengangkutan dan pergudangan	+	+	+	+	+	+	+	Unggulan

tabel berlanjut

(Lanjutan) Tabel 21. Hasil Analisis *Economic Based Approach* Kota Semarang Tahun 2016

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klassen	RPJ MD	Keterangan
		Ps	Ds	RPip (Analisis)	RPin (Referensi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	+	+	+	+	+	+	+	Unggulan
J. Informasi Dan Komunikasi	+	+	+	+	+	+		Potensi
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	+					+	+	Unggulan
L. Real Estat	+	+	+	+	+	+		Potensi
M,N. Jasa Perusahaan	+	+	+	+	+	+	+	Unggulan
P. Pendidikan		+	+	+	+	+	+	Potensi
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	+	+	+	+	+	+	+	Unggulan
R,S,U. Jasa lainnya	+		+				+	Unggulan

Sumber: Hasil SE2016 Listing, diolah

Tabel 21 menyatakan hasil analisis SE2016 dan kinerja ekonomi yang dilihat berdasarkan PDRB pada setiap kategori lapangan usaha atau sektor secara komparatif. Hasil analisis keempat metode statistik tersebut kemudian dikaitkan dengan sektor unggulan menurut RPJMD, sehingga hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan sektoral dan regional. Sinergitas data hasil SE, kinerja perekonomian dan program pembangunan Pemerintah Kota Semarang akan dibahas secara rinci pada bahasan berikutnya.

bab

4



Sektor Unggulan
Kota Semarang : Jasa
Kategori H, I, K, M, N,
Q, R, S dan U

Sektor Unggulan Kota Semarang : Jasa Kategori H, I, K, M, N, Q, R, S dan U

Sebagai Ibukota provinsi, Kota Semarang merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi terbesar se-Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun Kota Semarang menyumbang sekitar 13 persen dari total PDRB Jawa Tengah yang memiliki 35 Kabupaten/Kota. Sejalan dengan potret nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, jasa dan industri merupakan kategori utama dalam menopang perekonomian. Kategori berikutnya penopang perekonomian sedikit berbeda. Kategori Konstruksi (kategori F) dari tahun ke tahun bersaing ketat dengan sektor jasa dan industri dalam menyokong perekonomian Kota Semarang. Kategori F sebagai kontributor PDRB tertinggi ke tiga Kota Semarang jauh melampaui kontribusi tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Kontributor dominan ke tiga untuk tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sektor agraris (Kategori A). Kota Semarang sebagai wilayah perkotaan, sektor agraris merupakan sektor penyumbang terendah dalam struktur perekonomian.

Tabel 22. Perbandingan Struktur Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2012-2016

Tahun	Wilayah	Kategori Lapangan Usaha					
		A	C	F	G	Jasa (H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2012	Nasional	13,37	21,45	9,35	13,21	24,88	17,74
	Provinsi Jateng	15,87	34,95	10,13	14,22	21,09	3,74
	Kota Semarang	1	27,15	26,71	15,18	26,86	3,1
2013	Nasional	13,36	21,03	9,49	13,21	25,52	17,39
	Provinsi Jateng	15,84	35,21	10,01	13,97	21,27	3,7
	Kota Semarang	1,04	27,11	26,68	14,93	27,18	3,06

tabel berlanjut

(Lanjutan) Tabel 22. Perbandingan Struktur Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2012-2016

Tahun	Wilayah	Kategori Lapangan Usaha					
		A	C	F	G	Jasa (H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T dan U)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014	Nasional	13,34	21,08	9,86	13,43	26,03	16,26
	Provinsi Jateng	15,22	35,67	10,13	13,54	21,52	3,92
	Kota Semarang	1,01	27,52	26,84	14,39	27,14	3,1
2015	Nasional	13,49	20,97	10,21	13,31	27,16	14,86
	Provinsi Jateng	15,54	35,14	10,22	13,34	21,7	4,06
	Kota Semarang	1,02	27,46	27,04	14,12	27,23	3,13
2016	Nasional	13,45	20,51	10,38	13,19	27,68	14,79
	Provinsi Jateng	15,05	34,82	10,28	13,39	22,17	4,29
	Kota Semarang	0,98	27,45	26,88	14,06	27,55	3,08

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, diolah

Apabila dicermati menurut kategori lapangan usaha dengan berdasarkan hasil dari pengukuran keunggulan wilayah dengan berbagai metode *economic based approach* dan dipadukan dengan program Pemerintah Kota Semarang melalui RPJMD, kategori yang dinyatakan sebagai sektor unggulan adalah kategori berikut:

1. Pengangkutan dan Pergudangan (Kategori H)
2. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I)
3. Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K)
4. Jasa Perusahaan (Kategori M dan N)
5. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q)
6. Jasa lainnya (Kategori R, S dan U)

Tabel 23. Sektor Unggulan Kota Semarang Tahun 2016

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klas-sen	RPJ MD	Keterangan
		Ps	Ds	RPip (Analisis)	RPin (Referensi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
H. Pengangkutan dan pergudangan	+	+	+	+	+	KW 1	+	Unggulan
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	+	+	+	+	+	KW 3	+	Unggulan
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	+					KW 2	+	Unggulan
M,N. Jasa Perusahaan	+	+	+	+	+	KW 1	+	Unggulan
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	+	+	+	+	+	KW 3	+	Unggulan
R,S,U. Jasa lainnya	+		+			KW 4	+	Unggulan

Sumber: BPS, diolah.

Ke sembilan kategori tersebut dinyatakan sebagai kategori unggulan karena memenuhi ketiga syarat berikut:

- Hasil perhitungan analisis LQ > 1, dalam tabel 23 dinyatakan dengan notasi positif (+).
- Salah satu dari hasil analisis *shift-share*, MRP maupun Klassen dinyatakan dengan notasi positif (+) dalam tabel 21.
- Merupakan sektor unggulan dalam RPJMD.

Kategori unggulan dinyatakan berdasarkan beberapa pengukuran metode statistik. Menggunakan data jumlah tenaga kerja hasil SE2016, notasi positif (+) dalam uji LQ menunjukkan kategori tersebut berpotensi dalam hal penyerapan tenaga kerja. Data PDRB 2016 dan 2010 digunakan dalam analisis *shift-share*, MRP dan Klassen untuk mengidentifikasi pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi Kota Semarang secara komparatif.

Analisis LQ menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu kategori di daerah yang dianalisis dengan kemampuan kategori yang sama pada daerah yang lebih luas. Dengan metode LQ, dapat diketahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah analisis dibandingkan dengan daerah yang lebih luas (provinsi, nasional, dunia). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi daerah, salah satunya adalah jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing kategori lapangan usaha. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing kategori di wilayah analisis akan dibandingkan dengan seluruh tenaga kerja yang mampu diserap oleh perekonomian secara keseluruhan. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan perhitungan yang sama pada wilayah referensi (provinsi, nasional, dunia) sehingga akan diperoleh rasio penyerapan tenaga kerja (Widodo, 2006).

Data yang digunakan dalam analisis LQ pada publikasi ini adalah jumlah tenaga kerja hasil SE2016. Data tenaga kerja hasil SE2016 Kota Semarang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengetahui kategori mana saja yang memiliki keunggulan komparatif dalam hal penyerapan tenaga kerja berdasar hasil LQ. Hasil LQ bernilai lebih dari 1, ditunjukkan dengan notasi positif (+) pada tabel 23, memberikan arti bahwa rasio penyerapan tenaga kerja kesembilan kategori tersebut lebih tinggi daripada rasio penyerapan tenaga kerja pada kategori yang sama di wilayah referensi, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah.

Kelemahan dari analisis LQ terletak pada asumsinya yang menyatakan bahwa pola permintaan wilayah analisis dan wilayah referensi adalah sama. Kenyataannya, asumsi tersebut sulit untuk dipenuhi karena adanya perbedaan faktor pembentuk preferensi yang berbeda misalnya iklim, geografis, tradisi lokal, dll yang dapat mempengaruhi permintaan. Kelemahan lain dari LQ adalah asumsi bahwa produktivitas tenaga kerja di wilayah analisis dan wilayah referensi adalah sama. Sedangkan keunggulannya adalah LQ mempertimbangkan ekspor langsung dan tidak langsung serta karena metodenya yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya. Analisis LQ memadai digunakan sebagai pemberi gambaran awal terhadap kemampuan suatu daerah dalam kategori yang diidentifikasi.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengurangi kelemahan analisis LQ. Analisis *Shift Share* mengakui adanya perbedaan dan kesamaan antar wilayah. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa perubahan pendapatan, produksi atau tenaga kerja suatu wilayah dapat dibagi dalam tiga komponen yakni komponen pertumbuhan proporsional, komponen pertumbuhan regional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (Yuuha dan Cahyono, 2013). Analisis *Shift Share* sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian pada daerah yang lebih luas. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (tanpa kategori A, O, T) tahun 2010 sebagai tahun dasar analisis dan 2016 sebagai tahun akhir analisis dengan Kota Semarang sebagai wilayah analisis dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah referensi. Analisis *Shift Share* dalam publikasi ini mencermati komponen pertumbuhan proporsional (*Proportional Shift / Ps*) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*Differential Shift / Ds*) untuk mengetahui kategori mana saja di Kota Semarang yang pertumbuhannya lebih cepat dan berdaya saing lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Komponen pertumbuhan proporsional (*Proportional Shift / Ps*) bernilai lebih dari "0", dinyatakan dalam notasi positif (+) pada tabel 23 memberikan arti bahwa kategori tertentu di Kota Semarang tumbuh lebih cepat daripada kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*Differential Shift / Ds*) bernilai lebih dari "0", dinyatakan dalam notasi positif (+) pada tabel 23 memberikan arti bahwa kategori tertentu di Kota Semarang memiliki daya saing lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa selain kategori aktivitas keuangan dan asuransi (K) dan kategori jasa lainnya (R, S dan U), kategori lain dalam sektor unggulan di Kota Semarang tumbuh lebih cepat dan berdaya saing lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah. Walaupun pertumbuhan kategori jasa lainnya (R, S dan U) di Kota Semarang lebih lambat, namun daya saingnya lebih tinggi daripada kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan pengembangan dari model analisis *Shift Share*.

Analisis MRP bermanfaat dalam perencanaan pembangunan wilayah (Yuuha dan Cahyono, 2013). MRP membandingkan pertumbuhan kategori lapangan usaha tertentu pada suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar. Terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung melalui analisis MRP yaitu: rasio pertumbuhan wilayah study (RPip), dan rasio wilayah referensi (RPin). Karena yang dibandingkan adalah pertumbuhan, maka data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (tanpa kategori A, O, T) tahun 2010 sebagai tahun awal dan 2016 sebagai tahun akhir, dengan Kota Semarang sebagai wilayah analisis dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah referensi. Apabila nilai RPip > 1, maka diberi notasi positif (+), memberikan arti bahwa pertumbuhan kategori tertentu di Kota Semarang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Apabila nilai RPip < 1, maka diberi notasi negatif (-), memberikan arti bahwa pertumbuhan kategori tertentu di Kota Semarang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula apabila nilai RPin > 1, maka diberi notasi positif (+), memberikan arti bahwa pertumbuhan kategori tertentu di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB totalnya. Apabila nilai RPin < 1, maka diberi notasi negatif (-), memberikan arti bahwa pertumbuhan kategori tertentu di Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB totalnya.

Perhitungan dengan analisis MRP memperlihatkan bahwa pada sektor unggulan di Kota Semarang, kategori H, I, M, N dan Q bernilai positif baik pada komponen RPip maupun RPin. Nilai positif tersebut memberikan arti bahwa pertumbuhan kategori jasa lainnya sama-sama tinggi, baik di Kota Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain, menurut hasil analisis MRP, kategori tersebut merupakan kategori potensi baik di Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah. Kategori K, R, S dan U pada sektor unggulan di Kota Semarang bernilai negatif baik untuk RPip maupun RPin mengindikasikan bahwa pertumbuhan kategori tersebut sama-sama rendah, kategori tersebut tidak berpotensi baik di wilayah Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah.

Alat analisis terakhir yang digunakan adalah analisis Klassen. Analisis Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Analisis *Tipologi Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180):

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

2. Sektor maju tapi pertumbuhan tertekan (Kuadran II)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

3. Sektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran III)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

4. Bukan sektor potensial dan tertinggal (Kuadran IV)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

Data yang digunakan dalam analisis klasen pada publikasi ini adalah data PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku (tanpa kategori A, O, T) tahun 2010 sebagai tahun awal dan 2016 sebagai tahun akhir, dengan Kota Semarang sebagai wilayah analisis dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah referensi. Hasil analisis klasen menunjukkan bahwa pada kategori unggulan Kota Semarang, kategori H, M, N merupakan kategori yang termasuk sektor maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kategori yang termasuk pada kuadran I merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki nilai kontribusi kategori terhadap total PDRB Kota Semarang yang lebih besar dibandingkan kontribusi kategori tersebut terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kategori K di Kota Semarang termasuk sektor maju tapi pertumbuhan tertekan (Kuadran II). Dapat diartikan bahwa kategori K merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan kategori K di Provinsi Jawa Tengah namun nilai kontribusinya terhadap total PDRB Kota Semarang lebih besar dibandingkan kontribusi kategori tersebut terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kategori I dan Q di Kota Semarang termasuk sektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran III). Kategori I dan Q merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan kategori tersebut di Provinsi Jawa Tengah, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Jawa Tengah. Kategori R, S dan U di Kota Semarang menurut hasil analisis klasen termasuk bukan sektor potensial dan tertinggal (Kuadran IV). Kategori R, S dan U merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Nilai kontribusinya terhadap PDRB Kota Semarang juga lebih kecil dibandingkan kontribusi kategori yang sama terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

bab 5



Sektor Unggulan
Kota Semarang : Jasa
Kategori H, I, K, M, N,
Q, R, S dan U

Sektor Potensi : Kategori C, F, G, J, L dan P

Kategori C, G dan P merupakan kategori lapangan usaha yang termasuk sektor unggulan dalam RPJMD, tentunya selain kategori yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelumnya. Sedangkan kategori F, J dan L merupakan kategori dengan hasil perhitungan analisis LQ > 1, dalam tabel 21 dinyatakan dengan notasi positif (+) dan salah satu dari ketiga hasil analisis bernotasi positif (+) dalam tabel 21, walaupun tidak dinyatakan sebagai sektor unggulan menurut RPJMD.

Tabel 24. Sektor Potensi Kota Semarang Tahun 2016

Kategori	LQ	Shift Share		MRP		Klas-sen	RPJ MD	Keterangan
		Ps	Ds	RPip (Analisis)	RPin (Referensi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C. Industri Pengolahan			+	+		KW 3	+	Potensi
F. Konstruksi	+					KW 2		Potensi
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor						KW 4	+	Potensi
J. Informasi Dan Komunikasi	+	+	+	+	+	KW 1		Potensi
L. Real Estat	+	+	+	+	+	KW 1		Potensi
P. Pendidikan			+	+	+	KW 3	+	Potensi

Sumber: BPS, diolah.

Hasil LQ pada kategori C, G dan P bernilai kurang dari 1, ditunjukkan dengan tidak adanya notasi positif (+) pada tabel 24, memberikan arti bahwa penyerapan tenaga kerja ketiga kategori tersebut secara komparatif lebih rendah daripada penyerapan tenaga kerja pada kategori yang sama di wilayah referensi, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil LQ pada kategori F, J dan L bernilai lebih dari 1, ditunjukkan dengan notasi positif (+) pada tabel 24, memberikan arti bahwa penyerapan tenaga kerja kategori F, J dan L di Kota Semarang lebih tinggi daripada penyerapan tenaga kerja pada kategori yang sama di wilayah referensi, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Dalam analisis LQ, data tenaga kerja hasil SE2016 Kota Semarang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengetahui kategori mana saja yang memiliki keunggulan komparatif dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Analisis *shift share* dalam publikasi ini digunakan untuk mencermati komponen pertumbuhan proporsional (Ps) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (Ds) untuk mengetahui kategori mana saja di Kota Semarang yang pertumbuhannya lebih cepat dan berdaya saing lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sektor potensi Kota Semarang yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah positif, yaitu kategori J, L dan P. Notasi positif pada kedua komponen tersebut memberi arti bahwa kategori J, L dan P di Kota Semarang tumbuh lebih cepat dan berdaya saing lebih tinggi daripada kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Kategori C di Kota Semarang tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhannya di level provinsi, namun daya saingnya lebih rendah daripada kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Tidak terdapat notasi positif, baik terhadap komponen pertumbuhan proporsional maupun komponen pertumbuhan pangsa wilayah pada kategori F dan G menunjukkan bahwa secara komparatif, kategori F dan G tumbuh lebih lambat dan memiliki daya saing lebih rendah daripada kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Perhitungan dengan analisis MRP memperlihatkan bahwa pada sektor potensi Kota Semarang, kategori J, L dan P bernilai positif baik untuk RPip maupun RPin. Nilai positif tersebut memberikan arti bahwa pertumbuhan kategori J, L dan P sama-sama tinggi, baik di Kota Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain, menurut hasil analisis MRP, kategori tersebut merupakan kategori potensi baik di Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah. Kategori C bernilai positif untuk komponen RPip menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan industri pengolahan di Kota Semarang lebih tinggi daripada pertumbuhan kegiatan yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Kategori F dan G bernilai negatif baik untuk RPip maupun RPin mengindikasikan bahwa pertumbuhan kategori tersebut sama-sama rendah, kategori tersebut tidak berpotensi baik di wilayah Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis klasen menunjukkan bahwa pada sektor potensi Kota Semarang, kategori J dan L merupakan kategori yang termasuk sektor maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kategori yang termasuk pada kuadran I merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki nilai kontribusi kategori terhadap total PDRB Kota Semarang yang lebih besar dibandingkan kontribusi kategori tersebut terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kategori F di Kota Semarang termasuk sektor maju tapi pertumbuhan tertekan (Kuadran II). Dapat diartikan bahwa kategori F merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan kategori F di Provinsi Jawa Tengah namun nilai kontribusinya terhadap total PDRB Kota Semarang lebih besar dibandingkan kontribusi kategori tersebut terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kategori C dan P termasuk sektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran III). Kategori C dan P merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan kategori tersebut di Provinsi Jawa Tengah, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Jawa Tengah. Kategori G di Kota Semarang menurut hasil analisis klasen termasuk bukan sektor potensial dan tertinggal (Kuadran IV). Kategori G merupakan kategori dengan laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan kategori yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Nilai kontribusinya terhadap PDRB Kota Semarang juga lebih kecil dibandingkan kontribusi kategori yang sama terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis *economic based approach* memang tidak menempatkan kategori C dan G menjadi bagian dari sektor unggulan. Kedua kategori tersebut dinyatakan sebagai sektor potensi Kota Semarang karena merupakan kategori lapangan usaha yang termasuk sektor unggulan dalam RPJMD. Namun demikian, kedua kategori ini termasuk tiga besar kontributor tertinggi dalam menciptakan nilai tambah.

Hal ini menjadi suatu isyarat bagi Pemerintah Kota Semarang agar lebih memberi perhatian dan mengembangkan kedua kategori ini agar tidak hanya unggul di wilayah Kota Semarang saja namun juga dapat memiliki keunggulan komparatif.

Menarik untuk dicermati, bahwa kategori F, J dan L bukanlah kategori yang termasuk ke dalam sektor unggulan menurut RPJMD Kota Semarang. Namun demikian, hasil analisis *economic based approach* dengan metode LQ bernilai positif terhadap ketiga kategori tersebut. Notasi positif pada analisis LQ menandakan bahwa secara penyerapan tenaga kerja, kategori F, J dan L di Kota Semarang memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Bahkan pada kategori J dan L, keempat metode analisis seluruhnya bernilai positif. Artinya tidak hanya unggul dalam hal tenaga kerja, kategori J dan L memiliki keunggulan komparatif dalam hal pertumbuhan, kontribusi dan daya saing. Dapat diartikan bahwa secara komparatif, ketiganya memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, ketiga kategori ini dapat dipertimbangkan agar menjadi bagian dari sektor yang perlu dikembangkan dalam RPJMD Kota Semarang ke depannya. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kategori F dan J termasuk lima besar kategori penopang perekonomian Kota Semarang, bahkan kategori F apabila terpilah menurut kategori merupakan kontributor kedua terbesar penopang perekonomian Kota Semarang.

bab 6



Penutup

A. Kesimpulan

- Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang memiliki berbagai potensi untuk berkembang lebih maju. Kondisi geografis, kawasan strategis, pariwisata dan pendukungnya, sumber daya manusia dan kestabilan perekonomian Kota Semarang merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
- Hasil SE2016-Listing menunjukkan bahwa secara kuantitas, Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha dominan Kota Semarang dengan proporsi sebesar 95,73 persen. Sisanya sebesar 4,27 persen merupakan kegiatan Usaha Menengah Besar (UMB).
- Walaupun aktivitas ekonomi pada skala UMB hanya 4, 27 persen dari total jumlah usaha hasil SE2016-Listing, namun aktivitas ekonomi UMB mampu menyerap hampir separuh tenaga kerja di Kota Semarang.
- Dengan mengabaikan skala usaha, hasil SE2016-Listing mencatat empat aktivitas ekonomi dominan di Kota Semarang berturut-turut adalah kategori G (40,1 persen), I (25,77 persen), C (11,21 persen) dan kategori R, S dan U (7, 13 persen). Sedangkan kategori C, G, I dan P merupakan usaha yang menjadi tempat mata pencaharian hampir tiga per empat total pekerja di Kota Semarang (73,09 persen).
- Tantangan kemajuan Kota Semarang meliputi karakter topografi, kawasan rawan bencana, kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan dan pengangguran.
- Potensi ekonomi Kota Semarang berdasar RPJMD dan pengukuran berdasar empat metode statistik yaitu: LQ, shift-share, MRP dan analisis klassen mengelompokkan kategori lapangan usaha Kota Semarang ke dalam tiga sektor, yaitu sektor unggulan, sektor potensi dan bukan sektor unggulan maupun potensi.

B. Saran

- Sektor Unggulan Kota Semarang adalah sektor jasa pada kategori H, I, K, M, N, Q, R, S dan U. Walaupun secara akumulasi sektor jasa merupakan sektor dominan penopang perekonomian Kota Semarang, sesungguhnya apabila terpilah menurut kategori, andil tiap kategori tidak terlalu berarti. Hasil analisis menunjukkan terdapat keunggulan komparatif terhadap kesembilan kategori pada sektor jasa tersebut. Perhatian Pemerintah Kota Semarang diperlukan agar potensi keunggulan komparatif kategori pada sektor jasa tersebut dapat meningkatkan kontribusinya terhadap nilai tambah perekonomian Kota Semarang.
- Kategori C, G sebagai kontributor dominan dalam struktur perekonomian Kota Semarang, berdasar hasil pengukuran keempat metode ternyata belum optimal dalam sisi keunggulan komparatifnya. Pemerintah Kota Semarang agar lebih memberi perhatian dan mengembangkan kedua kategori ini agar tidak hanya unggul di wilayah Kota Semarang saja namun juga dapat memiliki keunggulan komparatif.
- Kategori F, J dan L bukanlah kategori yang termasuk ke dalam sektor unggulan menurut RPJMD Kota Semarang. Namun demikian, hasil analisis *economic based approach* dengan metode LQ menunjukkan bahwa secara rasio penyerapan tenaga kerja, kategori F, J dan L di Kota Semarang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Bahkan pada kategori J dan L, keempat metode analisis seluruhnya bernilai positif. Artinya tidak hanya unggul dalam hal rasio penyerapan tenaga kerja, kategori J dan L memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dalam hal pertumbuhan, kontribusi dan daya saing. Dapat diartikan bahwa secara komparatif, ketiganya memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Ketiga kategori ini dapat dipertimbangkan agar menjadi bagian dari sektor yang perlu dikembangkan dalam RPJMD Kota Semarang ke depannya. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kategori F dan J termasuk lima besar kategori penopang perekonomian Kota Semarang, bahkan kategori F apabila terpilah menurut kategori merupakan kontributor kedua terbesar penopang perekonomian Kota Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln (2014), *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Azyumardi Azra (1999), *Pendidikan Nasional versus Kemiskinan dalam Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pusat Statistik (2017), *Data dan Informasi Kemiskinan 2016*, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat.
- Badan Pusat Statistik (2017), *Tabel Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota 2016*, <https://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik (2016), *Data dan Informasi Kemiskinan 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017), *Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Saker-nas Agustus 2016*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017), *Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Agustus 2016*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017), *Tabel Dinamis IPM Jawa Tengah*, <https://jateng.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017), *Kota Semarang dalam Angka 2017*, Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017), *Statistik Daerah Semarang 2017*, Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017), *Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Bendavid-Val, Avrom (1991), *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourth Edition, Westport, Connecticut: Praeger.
- Blair, John P. (1991), *Urban and Regional Economics*, Homewood, Il. : Irwin.
- Hasbullah, J. (2012), *Tangguh dengan Statistik Akurat dalam Membaca Realita Dunia*, Nuansa Cendekia, Bandung.

- Hardjana, A. (1994), *Orientasi Perilaku Konsumsi tentang Masalah Pangan dan Gizi dari Sumber Hayati Kelautan*, Risalah Widyakarya Pangan dan Gizi, Jakarta: LIPI.
- Hoover, Edgar and Frank Giarratani. (1984), *An Introduction to Regional Economics*, Third Edition, New York: Alfred A. Knopf.
- Kasali, Rhenald (2014), *Pendidikan dan Rantai Kemiskinan*, Kompas.com, 24 Oktober 2014.
- Novita, Sari dan Fardianah Mukhyar (2011), *Kajian: Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Jurnal Agribisnis Perdesaan*, Volume 01 Nomor 04 Desember 2011.
- Pemerintah Kota Semarang (2017), *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016*, www.semarangkota.go.id.
- Pemerintah Kota Semarang (2017), *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Semarang Tahun 2016*, www.semarangkota.go.id.
- Pemerintah Kota Semarang (2017), *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021*, www.semarangkota.go.id.
- Rachman, H.P.S. dan S.H. Suhartini (1996), *Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Agro Ekonomi: 15 (2).
- Rachman, H.P.S dan Wahida (1998), *Dinamika Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga serta Prospek Permintaan Pangan dalam Dinamika Ekonomi Pedesaan: Perubahan Struktur Pendapatan, Ketenagakerjaan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga*, Bogor, Kerjasama Puslit Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation.
- Sari, Dewi Novita (2016), *Perkembangan IPM Jawa Tengah*, Harian Suara Merdeka, Sabtu, 17 Desember 2016.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sirusa BPS (2017), *Indikator*, <https://sirusa.bps.go.id/>.
- Sjafrizal (2008), *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Subarna, Trisna (2012), *Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat*. Jurnal Bina Praja. Volume 4 No. 4 Desember 2012 Halaman 243 – 250.
- Sukirno, Sadono (2006), *Ekonomi Pembangunan (Edisi Kedua)*, Jakarta, Kencana.
- Sukirno, Sadono (2000), *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. (2002), *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta, Andi Offset.

- Suryana, A, B. Rachman dan P.U. Hadi (1988), *Pola Pengeluaran untuk Konsumsi di Pedesaan Jawa Barat dalam Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*, Pusat Penelitian Agro Ekonomi.
- Suryawati, Chriswardani (2005), *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, JMPK Vol. 08 Nomor 03, September 2005.
- Tambunan (2003), *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development*, Eight Edition, England: Pearson Education Limited.
- Todaro. M.P. (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Tri (2006), *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*, Jogjakarta, UPP STIM YKPN.
- Yuuhaa, M Iqbal Wahyu dan Cahyono, Hendry (2013), *Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan*, Surabaya, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol 1 No. 3.
- Yusuf, Maulana, MS., MT. (1999), *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVII Nomor 2.



Catatan Teknis

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen.

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu kategori di daerah yang dianalisis dengan kemampuan kategori yang sama pada daerah yang lebih luas. Dengan metode LQ, dapat diketahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah analisis dibandingkan dengan daerah yang lebih luas (provinsi, nasional, dunia). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi daerah, salah satunya adalah jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing kategori lapangan usaha. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing kategori di wilayah analisis akan dibandingkan dengan seluruh tenaga kerja yang mampu diserap oleh perekonomian secara keseluruhan. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan perhitungan yang sama pada wilayah referensi (provinsi, nasional, dunia) sehingga akan diperoleh rasio penyerapan tenaga kerja (Widodo, 2006).

Untuk mendapatkan kategori unggulan di suatu wilayah analisis berdasarkan analisis LQ, digunakan rumus berikut:

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Keterangan:

S_{ij} : PDRB pada kategori i pada wilayah analisis j

S_j : PDRB pada wilayah analisis j

S_{in} : PDRB pada kategori i di wilayah referensi

S_n : PDRB di wilayah referensi

Berpijak pada data SE2016-L yang menghasilkan indikator jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja, maka pada publikasi ini, PDRB pada rumus di atas tergantikan menggunakan jumlah tenaga kerja. Data tenaga kerja hasil SE2016 Kota Semarang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengetahui kategori mana saja yang memiliki keunggulan komparatif dalam hal rasio penyerapan tenaga kerja berdasar hasil LQ. Pengukuran LQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

- ⇒ Jika $LQ > 1$, kategori i di wilayah analisis j merupakan kategori unggulan, yaitu kategori yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah analisis tersebut daripada tingkat wilayah yang lebih luas lagi (wilayah referensi). Menggunakan data tenaga kerja hasil SE2016-L, dapat diartikan bahwa rasio penyerapan tenaga kerja kategori i di wilayah analisis j lebih baik daripada rasio penyerapan tenaga kerja kategori i di wilayah referensi.
- ⇒ Jika $LQ = 1$, kategori i di wilayah analisis j bukan merupakan kategori unggulan, yaitu kategori yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi. Menggunakan data tenaga kerja hasil SE2016-L, dapat diartikan bahwa rasio penyerapan tenaga kerja kategori i di wilayah analisis j sama dengan rasio penyerapan tenaga kerja kategori i di wilayah referensi.
- ⇒ Jika $LQ < 1$, kategori i di wilayah analisis j bukan merupakan kategori unggulan, yaitu kategori yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah referensi dapat diartikan bahwa rasio penyerapan tenaga kerja kategori i di wilayah analisis j lebih rendah daripada rasio penyerapan tenaga kerja kategori i di wilayah referensi.

Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Apabila LQ mencermati kontribusi, Analisis *shift share* melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan baik dalam skala yang lebih luas (wilayah referensi) maupun dalam skala yang lebih kecil atau wilayah analisis (Yusuf, 1999).

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengurangi kelemahan analisis LQ. Analisis *Shift Share* mengakui adanya perbedaan dan kesamaan antar wilayah. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa perubahan pendapatan, produksi atau tenaga kerja suatu wilayah dapat dibagi dalam tiga komponen yakni komponen pertumbuhan proporsional, komponen pertumbuhan regional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (Yuuha dan Cahyono, 2013). Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Dalam metode ini terdapat 3 bagian yaitu:

- **Regional Share (RS)** merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku.
- **Proporsional Shift (PS)** komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- **Differential Shift (DS)** merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
- **Shift Share(SS)** merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Shift* dan *Differential Shift*.

Jika ingin melihat keunggulan wilayah di suatu wilayah berdasarkan analisis *Shift Share*, maka keempat unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$RS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right) \quad PS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{it}}{y_{i0}} - \frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$DS_{ij} = y_{ij0} \left(\frac{y_{ijt}}{y_{ij0}} - \frac{y_{it}}{y_{i0}} \right) \quad SS_{ij} = RS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Keterangan:

- Y_t = PDRB wilayah referensi periode akhir tahun.
- Y_0 = PDRB wilayah referensi periode awal tahun.
- Y_{it} = PDRB wilayah referensi kategori ke-i periode tahun akhir.
- Y_{i0} = PDRB wilayah referensi kategori ke-i periode tahun awal.
- Y_{ijt} = PDRB wilayah analisis kategori ke-i periode tahun akhir.
- Y_{ij0} = PDRB wilayah analisis kategori ke-i periode tahun awal.

Interpretasi dari hasil pengukuran diatas sebagai berikut:

Jika $PS_{ij} > 0$, artinya bahwa kategori i pada suatu wilayah analisis tumbuh lebih cepat daripada kategori i di wilayah referensi, dan sebaliknya.

Jika $DS_{ij} > 0$, artinya bahwa daya saing kategori i pada suatu wilayah analisis lebih tinggi dari daya saing kategori i di wilayah referensi, dan sebaliknya.

Jika $SS_{ij} > 0$, artinya terjadi penambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja ekonomi daerah pada kategori i di wilayah analisis tersebut.

Dari ukuran diatas, maka kategori unggulan wilayah adalah kategori yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing suatu kategori menunjukkan potensi yang tinggi untuk dikembangkan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (tanpa kategori A, O, T) tahun 2010 sebagai tahun dasar analisis dan 2016 sebagai tahun akhir analisis dengan Kota Semarang sebagai wilayah analisis dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah referensi.

Analisis *Shift Share* dalam publikasi ini mencermati komponen pertumbuhan proporsional (*Proportional Shift / Ps*) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*Differential Shift / Ds*) untuk mengetahui kategori mana saja di Kota Semarang yang pertumbuhannya lebih cepat dan berdaya saing lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan pengembangan dari model analisis *Shift Share*. Analisis MRP bermanfaat dalam perencanaan pembangunan wilayah (Yuuha dan Cahyono, 2013). Metode MRP melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). MRP membandingkan pertumbuhan suatu kategori pada suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih besar, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada analisis ini terdapat dua rasio pertumbuhan yang bisa dihitung yaitu: rasio pertumbuhan wilayah analisis (RP_{ip}), dan rasio wilayah referensi (RP_{in}).

Jika ingin melihat sektor unggulan suatu wilayah berdasar analisis MRP, digunakan rumus sebagai berikut:

$$RP_{ip} = \frac{(Y_{ipt} - Y_{ipo}) / Y_{ipo}}{(Y_{pt} - Y_{po}) / Y_{po}}$$

$$RP_{in} = \frac{(Y_{int} - Y_{ino}) / Y_{ino}}{(Y_{nt} - Y_{no}) / Y_{no}}$$

Keterangan:

Y_{ipt} = PDRB kategori i wilayah analisis ke p pada periode tahun akhir.

Y_{ipo} = PDRB kategori i wilayah analisis ke p pada periode tahun awal.

Y_{pt} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun akhir.

Y_{po} = PDRB total wilayah analisis p pada periode tahun awal.

Y_{int} = PDRB kategori i wilayah referensi pada periode tahun akhir.

Y_{ino} = PDRB kategori i wilayah referensi pada periode tahun awal.

Y_{nt} = PDRB wilayah referensi pada periode tahun akhir.

Y_{no} = PDRB wilayah referensi pada periode tahun awal.

MRP hanya memperhitungkan pertumbuhan kategori, tanpa melihat kontribusi kategori tersebut di dalam suatu wilayah. Berikut interpretasi hasilnya:

- ◇ Jika RP_{ip} dan RP_{in} bernotasi positif maka pertumbuhan kategori i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi → kategori tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya).
- ◇ Jika hanya RP_{ip} yang bernotasi positif maka pertumbuhan kategori i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi → kategori tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi.
- ◇ Jika hanya RP_{in} yang bernotasi positif maka pertumbuhan kategori i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi → kategori tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi.
- ◇ Jika baik RP_{ip} dan RP_{in} tidak bernotasi positif maka pertumbuhan kategori i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah → kategori tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi).

Karena yang dibandingkan adalah pertumbuhan, maka data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (tanpa kategori A, O, T) tahun 2010 sebagai tahun awal dan 2016 sebagai tahun akhir, dengan Kota Semarang sebagai wilayah analisis dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah referensi.

Tipologi Klassen

Alat analisis terakhir yang digunakan adalah analisis Klassen. Analisis Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Analisis *Tipologi Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180):

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

2. Sektor maju tapi pertumbuhan tertekan (Kuadran II)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

3. Sektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran III)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

4. Bukan sektor potensial dan tertinggal (Kuadran IV)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

Berikut matriks sesuai empat klasifikasi sektor dengan tipe karakteristik tertentu untuk melihat sektor unggulan di tingkat wilayah analisis:

Tabel 25. Matriks Klasifikasi Sektor Menurut Karakteristik Pertumbuhan dan Kontribusi per Kategori

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	Pertumbuhan Sektoral
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I)	Sektor maju tapi pertumbuhan tertekan (Kuadran II)
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran III)	Bukan sektor potensial dan tertinggal (Kuadran IV)

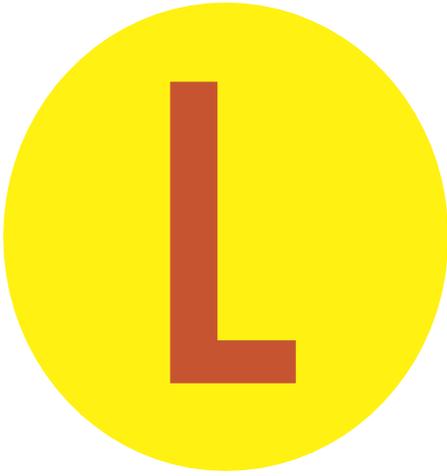
Keterangan:

- G_i : Pertumbuhan kategori i di wilayah analisis
 G : Pertumbuhan kategori i di wilayah referensi
 S_i : Kontribusi kategori i di wilayah analisis
 S : Kontribusi kategori i di wilayah referensi

Penentuan Sektor Unggulan Wilayah

Untuk menentukan sektor/kategori yang merupakan unggulan wilayah, digunakan gabungan dari metode pengukuran yang digunakan, yaitu LQ, Analisis *Shift-Share*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klasen dengan sektor unggulan menurut RPJMD kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor unggulan, sektor potensi dan bukan sektor unggulan maupun potensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinyatakan sebagai sektor unggulan apabila kategori lapangan usaha memenuhi ketiga syarat berikut:
 - a. Hasil perhitungan analisis $LQ > 1$, dalam tabel 21 dinyatakan dengan notasi positif (+).
 - b. Salah satu dari hasil analisis *shift-share*, MRP maupun Klasen dinyatakan dengan notasi positif (+) dalam tabel 21.
 - c. Merupakan sektor unggulan dalam RPJMD.
2. Sektor potensi apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Kategori lapangan usaha termasuk sektor unggulan dalam RPJMD.
 - b. Hasil perhitungan analisis $LQ > 1$, dalam tabel 21 dinyatakan dengan notasi positif (+) dan salah satu dari ketiga hasil analisis bernotasi positif (+) dalam tabel 21, walaupun tidak dinyatakan sebagai sektor unggulan menurut RPJMD.
3. Bukan merupakan sektor unggulan maupun potensi apabila tidak memenuhi kriteria 1 atau 2.



<https://sejarahngkora.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1.

Tabel 26. Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* (LQ)

Kategori	Jumlah Tenaga Kerja Hasil SE2016-L		Hasil LQ	Notasi
	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	48.144	81	0,0229	
C. Industri Pengolahan	3.142.117	192.389	0,8337	
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	14.446	650	0,6127	
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	32.082	2.310	0,9804	
F. Konstruksi	209.897	23.664	1,5351	+
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.838.148	171.818	0,8243	
H. Pengangkutan dan perdagangan	257.250	30.297	1,6036	+
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	972.406	88.973	1,2458	+
J. Informasi Dan Komunikasi	119.530	11.626	1,3244	+
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	243.325	32.648	1,8269	+
L. Real Estat	31.968	7.364	3,1366	+
M dan N. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	183.549	29.366	2,1784	+
P. Pendidikan	814.423	51.654	0,8636	
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	173.266	19.147	1,5047	+
R, S dan U. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	324.275	28.724	1,2061	+
Total	9.404.826	690.711		

Lampiran 2.

Tabel 27. PDRB atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2010 dan 2016** Tanpa Kategori A, O dan T

Kategori	PDRB atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah		PDRB atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang	
	2010	2016**	2010	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan Penggalan	13.346.392,63	19.196.344,88	160.719,90	183.040,19
C. Industri Pengolahan	215.156.474,55	295.578.699,27	20.032.777,83	29.774.287,96
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	636.381,90	947.683,59	97.242,25	145.186,35
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	543.235,90	594.621,94	99.631,29	106.996,06
F. Konstruksi	64.423.248,23	86.675.665,25	22.459.127,46	30.196.835,55
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	91.678.669,23	121.848.968,13	13.083.365,34	17.264.313,85
H. Pengangkutan dan pergudangan	18.644.272,73	28.256.957,47	2.739.452,69	4.198.856,37
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	18.772.500,06	26.608.639,00	2.469.885,80	3.702.328,34
J. Informasi Dan Komunikasi	20.826.935,54	35.407.838,02	6.581.507,25	11.206.438,30
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	17.234.332,49	23.581.054,58	3.606.962,50	4.868.489,75
L. Real Estat	10.670.140,43	15.762.360,15	2.358.521,60	3.513.591,50
M dan N. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	1.782.800,10	2.997.643,65	425.226,85	714.991,36
P. Pendidikan	16.352.073,04	31.267.797,65	1.396.295,03	2.697.305,49
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	4.096.105,88	6.848.708,81	488.970,39	820.055,20
R, S dan U. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	9.723.735,44	13.184.131,34	966.669,11	1.320.977,86
Total	503.887.298,16	708.757.113,74	76.966.355,29	110.713.694,13

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3.

Tabel 28. PDRB atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2016
Tanpa Kategori A, O dan T**

Kategori	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016**	
	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang
(1)	(2)	(3)
B. Pertambangan dan penggalian	26.439.702,88	238.312,51
C. Industri Pengolahan	376.363.132,44	40.072.163,84
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.032.069,49	160.243,55
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	664.729,34	118.748,19
F. Konstruksi	112.240.967,53	39.243.978,27
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	146.895.930,67	20.530.864,20
H. Pengangkutan dan Pergudangan	33.541.542,59	5.497.900,38
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	34.507.537,41	5.111.497,17
J. Informasi Dan Komunikasi	33.341.760,54	10.285.924,51
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	32.370.979,22	6.697.179,03
L. Real Estat	18.161.474,60	3.996.895,65
M dan N. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	3.912.637,05	943.324,01
P. Pendidikan	46.117.040,98	4.098.160,52
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	9.251.290,00	1.121.172,89
R, S dan U. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	16.344.845,85	1.667.449,65
Total	891.185.640,58	139.783.814,38

**= Angka Sangat Sementara

Lampiran 4.

Tabel 29. Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share

Kategori	Proporsional Shift (PS)	Differential Shift (DS)	Notasi	
			Ps	Ds
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	5.101,00	-48.125,99	+	
C. Industri Pengolahan	-656.951,38	2.253.561,82		+
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8.031,79	375,70	+	+
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-31.083,58	-2.059,60		
F. Konstruksi	-1.373.800,40	-19.893,15		
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	-1.013.845,71	-124.622,75		
H. Pengangkutan dan Pergudangan	298.614,43	46.986,29	+	+
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	26.792,95	201.446,76	+	+
J. Informasi Dan Komunikasi	1.931.801,83	17.228,90	+	+
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	-138.212,49	-66.774,19		
L. Real Estat	166.656,75	29.488,63	+	+
M dan N. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	116.871,81	4,55	+	+
P. Pendidikan	705.942,24	27.364,48	+	+
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	129.785,54	2.494,35	+	+
R, S dan U. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	-49.017,47	10.299,21		+

Lampiran 5.

Tabel 30. Hasil Perhitungan Analisis MRP

Kategori	Rasio Pertumbuhan Wilayah Analisis (RPip)	Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPin)	Notasi	
			RPip	RPin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	0,3167	1,0781		+
C. Industri Pengolahan	1,1090	0,9193	+	
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	1,1245	1,2031	+	+
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,1686	0,2327		
F. Konstruksi	0,7857	0,8496		
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	0,7288	0,8094		
H. Pengangkutan dan pergudangan	1,2150	1,2681	+	+
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1,1380	1,0267	+	+
J. Informasi Dan Komunikasi	1,6027	1,7219	+	+
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,7977	0,9058		
L. Real Estat	1,1169	1,1738	+	+
M dan N. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	1,5541	1,6760	+	+
P. Pendidikan	2,1250	2,2435	+	+
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1,5443	1,6528	+	+
R, S dan U. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	0,8359	0,8753		

Lampiran 6.

Tabel 31. Hasil Perhitungan Analisis Klassen

Kategori	Pertumbuhan Sektoral		Kontribusi Sektoral		Kwadran
	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan Penggalan	43,83	13,89	107,81	31,67	KW4
C. Industri Pengolahan	37,38	48,63	91,93	110,90	KW3
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	48,92	49,30	120,31	112,45	KW3
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	9,46	7,39	23,27	16,86	KW2
F. Konstruksi	34,54	34,45	84,96	78,57	KW2
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	32,91	31,96	80,94	72,88	KW4
H. Pengangkutan dan pergudangan	51,56	53,27	126,81	121,50	KW1
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	41,74	49,90	102,67	113,80	KW3
J. Informasi Dan Komunikasi	70,01	70,27	172,19	160,27	KW1
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	36,83	34,97	90,58	79,77	KW2
L. Real Estat	47,72	48,97	117,38	111,69	KW1
M dan N. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	68,14	68,14	167,60	155,41	KW1
P. Pendidikan	91,22	93,18	224,35	212,50	KW3
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	67,20	67,71	165,28	154,43	KW3
R, S dan U. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	35,59	36,65	87,53	83,59	KW3

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jl. Inspeksi Kali Semarang no.1, Kota Semarang
Telp.: 024 3546413, Fax: 024 3546413

Homepage: <http://www.semarangkota.bps.go.id> E-mail: bps3374@bps.go.id